



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG TIMUR
DESA SIDOMUKTI
Jl. Jend. A. Yani No. 121 Sidomukti Abung Timur Lampung Utara 34583

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-DES)
TAHUN 2022 – 2028



DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN ABUNG TIMUR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya lah Penyusunan DRAFF RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) Desa Sidomukti hingga menjadi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) Desa Sidomukti Tahun 2022 s.d 2028 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini berisikan usulan- usulan yang menjadi Program dan Kegiatan di Desa Sidomukti .

Dalam proses penyusunan RPJM-DES ini, dilakukan dengan melalui Tahapan Awal Pengkajian Keadaan Desa/ Review MMDD di setiap Dusun, kemudian RPJM-DES ini disahkan dengan Peraturan Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa.

Dari Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan dan tersusunnya RPJM-DES ini tentu saja banyak sekali Kekurangan, untuk itu Saran, Kritik Konstruktif yang bersifat Positif sangat diharapkan demi tercapainya Peningkatan Kualitas dalam Penyusunan RPJM-DES untuk Periode mendatang.

Demikianlah RPJM Desa Sidomukti ini dibuat dengan harapan semoga dapat bermanfaat sebagai upaya pengentasan Kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Tujuan Pemerintah secara Nasional.

Sidomukti,

Tim Penyusun

PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Peraturan Desa	iii
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Tujuan dan Manfaat	I-2
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA (PROFIL DESA)	II-1
2.1 Kondisi Desa	II-1
2.1.1 Sejarah Desa	II-1
2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa	II-2
2.1.3 Sejarah Pembangunan Desa	II-2
2.1.4 Kondisi Geografis	II-3
2.2 Prasarana dan Sarana Desa	II-7
2.2.1. Kondisi Pemerintahan Desa	II-8
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	II-10
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Kerangka hubungan keuangan Desa/APBDesa.....	III-1
3.2. Kerangka hubungan Strategi dengan Komponen APBDesa	III-2
Arah Kebijakan Pendapatan.....	III-4
Arah Kebijakan Pembiayaan	III-5
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2. Isu-isu Strategis	IV-16
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-3
5.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-8
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-1
6.1. Strategi	VI-1
6.2. Arah Kebijakan	VI-6

BAB VII :	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
	DESA	VII-1
7.1.	Kebijakan Umum	VII-1
7.2.	Program Pembangunan	VII-3
BAB VIII :	: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS	VIII-1
8.1.	Indikasi Program Prioritas	VIII-1
BAB IX :	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA	IX-1
9.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IX-1
9.2.	Aspek Pelayanan Dasar	IX-1
9.3.	Aspek Pelayanan Lainnya	IX-4
BAB X :	KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI	X-1
10.1.	X-1
10.2.	X-2
BAB XI :	PENUTUP	XI-1
	Lampiran-lampiran	



**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR : 01/TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2022 - 2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMUKTI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomukti, yang merupakan landasan Hukum untuk mengatur kebijakan- kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. Bahwa melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada huruf a, dan b, perlu diteapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
5. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2015 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA SIDOMUKTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA) SIDOMUKTI
TAHUN 2022- 2028**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidomukti dan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sidomukti
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Keputusan Kepala Desa adalah Semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan merupakan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) Tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan Program Prioritas Kewilayahan, disertai dengan Rencana Kerja.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Profil Desa adalah gambaran Menyeluruh tentang Karakter Desa yang meliputi Data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Kelembagaan, Sarana prasarana serta perkembangan Kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM- Desa dapat di ajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh- sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang di wadahi oleh LPMP.
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintah Desa di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Dusun kepentingan umum yaitu : LPMP, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lainnya.
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan Dsa, maka pemerintahan Desa mengundang LPM, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain lain untuk melakukan Msrenbang- Desa mmbawa RPJM-Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa serta LPM dan Lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan. BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMK dan LK atau sebutan lain dalam forum musrenbang.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

RPJM-Desa dapat di rubah jika:

- (1) Terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya pada Lembaran Desa.

DITETAPKAN DI : SIDOMUKTI
PADA TANGGAL : 28-12-2021



DIUNDANGKAN DI : DESA SIDOMUKTI
PADA TANGGAL : 28-12-2021
SEKRETARIS DESA



IMAM MA'RUF, S.Ag
LEMBARAN DESA SIDOMUKTI TAHUN 2022 NOMOR : 01

Mengetahui dan menyetujui,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas:

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi

9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.

Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Penggalian informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2022 - 2028, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022 – 2028 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD maupun masyarakat umum.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

Landasan Ideologis Pancasila.

Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan Pokok :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

1.3 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud yaitu:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan

tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.

2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
 - b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
 - c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
 - d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.4 sistematika

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Desa |
| BAB III | : Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan |
| BAB IV | : Analisis Isu-isu Strategis |

- BAB V** : Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
- BAB VI** : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- BAB VII** : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa
- BAB VIII** : Indikasi Rencana Program Prioritas
- BAB IX** : Penetapan Indikator Kinerja
- BAB X** : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA (PROFIL DESA)

2.1. Kondisi Desa

Desa Sidomukti dengan luas \pm 1500 ha, dengan jumlah penduduk 5562 jiwa terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 37 m dari permukaan laut . Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani dan pekebun karet dan sawit.

Ada pula yang memiliki usaha sampingan sebagai mata pencaharian tambahan yaitu sebagai pedagang, peternak dan PNS.

2.1.1. Sejarah Desa

Pada tanggal 04 april 1973 di gedung SD Sidomukti diadakan rapat/musyawarah yang dipimpin oleh KUPT. Hadir dalam musyawarah tersebut adalah ketua RT, Ketua RK, Kepala-kepala rombongan, tokoh-tokoh transmigran, pemuka agama dan beberapa warga transmigran.

Dalam musyawarah tersebut bertujuan membahas pemilihan nama desa dan menetapkan tanggal hari jadi atau berdirinya desa. Dari para peserta musyawarah mengusulkan agar desa diberi nama "SIDOMUKTI", tetapi ada sebagian yang mengusulkan agar desa diberi nama "WONOREJO".

Setelah dimusyawarahkan lebih lanjut ternyata 80 % peserta musyawarah memilih nama desa "SIDOMUKTI", sedangkan 20 % memilih nama desa "WONOREJO". Akhirnya peserta musyawarah sepakat dan menjadi keputusan musyawarah bahwa nama desa adalah desa "SIDOMUKTI".

Berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 04 April 1973 menetapkan sebagai tanggal, bulan dan tahun jadinya desa Sidomukti adalah pada 5 Mei 1971, karena pada tanggal 5 Mei 1971 merupakan tanggal kedatangan rombongan transmigran pertama yang ditempatkan di desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

2.1.2. Sejarah Pemerintahan Desa (Demografi)

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa

**NAMA-NAMA /KEPALA DESA
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA SIDOMUKTI**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1971 – 1973	Wiro Sukarto	Kepala Desa Persiapan
2	1973 – 1988	Sabari Suparjo	Kepala Desa
3	1988 – 1989	Katiman	Pj. Kepala Desa
4	1989 – 1990	Suparjo	Kepala Desa
5	1990 – 2003	Miseri	Kepala Desa
6	2003 – 2005	Hartini	Pj. Kepala Desa
7	2005 – 2011	Mujiono, S.Pd	Kepala Desa
8	2011 – 2012	Imam Ma'ruf, S.Ag	Pj. Kepala Desa
9	2012 – 2018	Mujiono, S.Pd	Kepala Desa
10	2018-2020	Yasir Arafat, SE	Pj. Kepala Desa
11	2020-2021	Gunawan Nur Asbari, SH.MM	Pj. Kepala Desa
12	2021-Sekarang	Eko Yudianto	Kepala Desa

Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	1985	Pembangunan Masjid Al-Munawaroh	Swadaya
2	1984	Pembangunan Balai Desa	Swadaya
3	1985	Pembangunan Masjid Al-Munawaroh	Swadaya
4	1986	Pembangunan Masjid Al-Mustaqim	Swadaya
5	1986	Pembangunan Masjid Nurul Islam	Swadaya
6	1986	Pembangunan Masjid Al-Muhajirin	Swadaya
7	1988	Pembangunan Masjid Nurul Iman	Swadaya
8	1989	Pembangunan Masjid At-Taqwa	Swadaya
9	1991	Pembangunan Gapura batas DESA	Swadaya

10	1991	Pembangunan Gapura batas dusun	Swadaya
11	1994	Pembangunan Masjid Al Hidayah	Swadaya
12	2004	Pembangunan Jembatan	PPK
13	2006	Pembangunan Gedung TK Darma wanita II	PPK
14	2008	Pembangunan Gedung TK Darma wanita I	PNPM-MPd
15	1988	Pembangunan Balai dusun III	Swadaya
16	2009	Pembangunan Jalan Onderlagh	PNPM-MPd
17	2011	Pembangunan gedung posyandu	PNPM-MPd
18	2012	Perkerasan Jalan usahan tani dusun 4	Dinas Pertanian
19	2013	Perkerasan jalan onderlagh dusun 3 dan 6	PNPM-MPd
20	2014	Perkerasan jalan onderlagh dusun 3 dan 4	PNPM-MPd
21	2014	Perkerasan jalan usaha tani dusun 2	Dinas Pertanian
22	2014	Perkerasan jalan onderlagh dusun 1 Desa Sidomukti Dan dusun 4 Desa Bumi Jaya	PNMP-MP / MP3KI
23	2015	Perkerasan jalan onderlagh di dusun1 Desa Sidomukti	Pemerintah
24	2015	Pembangunan Gorong- gorong 5 Unit di Dusun 1 Desa Sidomukti	Pemerintah
25	2015	Pembngunan Siring Pasang di Dusun 1 Desa Sidomukti	Pemerintah
26	2016	Pembangunan Sumur Bor 3 Unit di Dusun IV,V dan VI Desa Sidomukti	Pemerintah
27	2016	Pembangunan Onderlagh / Jalan Telford di Dusun V Desa Sidomukti	Pemerintah
28	2016	Pembangunan Gorong-Gorong 9 Unit di Dusun II, IV, dan V Desa Sidomukti	Pemerintah
29	2017	Pembanguna Onderlagh di Dusun VI Desa Sidomukti	Pemerintah
30	2017	Pembangunan Kantor desa di Dusun II Desa Sidomukti	Pemerintah
31	2017	Pembangunan 5 Unit Gorong;Gorong di Dusun VI Desa Sidomukti	Pemrintah
32	2017	Pembangunan 1 Unit Sumur Bor di Dusun II Desa Sidomukti	Pemerintah
33	2017	Pembangunan Onderlagh di Dusun VI Desa Sidomukti	Pemerintah
34	2017	Pembangunan Rehab Jembatan di Dusun II Desa Sidomukti	Pemerintah
35	2017	Pembangunan Gorong-Gorong di Dusun II (3 unit), Dusun IV (1 Unit) di Desa Sidomukti	Pemerintah
36	2018	Pembanguan Onderlagh di Dusun VII Desa sidomukti	Pemerintah
37	2018	Pembangunan Onderlagh di Dusun II Desa Sidomukti	Pemerintah
38	2018	Pembanguna 9 Unit Gorong-Gorong di Dusun II Desa	Pemerintah

		Sidomukti	
39	2018	Pembangunan 8 Unit Gorong-Gorong di Dusun VII Desa Sidomukti	Pemerintah
40	2018	Pmbangunan 1 Unit Gorong-Gorong di Dusun IV desa Sidomukti	Pemerintah
41	2018	Pembangunan Siring Pasang di Dusun V Desa Sidomukti	Pemerintah
42	2018	Pembangunan 1 Unit Gorong-Gorong di Dusun V Desa Sidomukti	Pemerintah
43	2018	Pembangunan LAPEN di Dusun III Desa Sidomukti	Pemerintah
44	2019	Pembangunan Balai Desa Sidomukti di Dusun II	Pemerintah
45	2019	Pembangunan Sarana Olahraga Multi Guna di Dusun II Desa Sidomukti	Pemerintah
46	2019	Pembangunan 1 Unit Gorong-Gorong di Dusun VI Desa Sidomukti	Pemerintah
47	2019	Pembangunan Drainase di Dusun VI Desa Sidomukti	Pemerintah
48	2019	Pembangunan Tribun di Dusun II, (1 Unit) dan di Dusun V (1 Unit) Desa Sidomukti	Pemerintah
49	2019	Pembangunan Siring Pasang di Dusun V Desa Sidomukti	Pemerintah
50	2019	Pembangunan LAPEN di Dusun V Desa Sidomukti	Pemerintah
51	2019	Pembangunan EMBUNG di Dusun VI Desa Sidomukti	Pemerintah
52	2019	Pembngunan Talut Tersier di Dusun V Desa Sidomukti	Pemerintah
53	2019	Pembangunan 1 Unit Gorong-Gorong di Dusun II Desa Sidomukti	Pemerintah
54	2020	Pembangunan Onderlagh di Dusun 3 Desa Sidomukti	Pemerintah
55	2021	Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun 1 Desa Sidomukti	Pemrintah dan swadaya

KONDISI GEOGRAFIS

Tabel 3. Kondisi Geografis

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 1500 Ha	
2	Jumlah Dusun : 7 (tujuh) 1) Dusun Sumber Sari 2) Dusun Sidomukti 3) Dusun Sidomulyo 4) Dusun Purwosari 5) Dusun Purwodadi 6) Dusun Asrikaton 7) Dusun Sidorejo	
3	Batas wilayah : a. Utara: Desa Tatakarya b. Selatan : Desa Semuli Raya/Semuli Jaya c. Barat : Desa Sumber Agung/ Bangun sari d. Timur : Desa Bumi Jaya/Bumi Restu	
4	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar : 1500 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 37 m	
5	Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis	
6	Klimatologi : a. Suhu 33 – 37 °C b. Curah Hujan 1125 mm c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah irigasi : 995,00 Ha b. Sawah tadah hujan : 51,00 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 148,25 Ha	
9	Kawasan rawan Banjir : - Ha	

Kedadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Tabel 4. Tabel Sumber Penerimaan Desa

No	Sumber Penerimaan Desa	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pajak	66.149.287		69.431.670
2	Pendapatan tanah Kas			
4	ADP			

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

Penerimaan Pajak, mulai tahun 2019 s/d 2021 mengalami peningkatan. Peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021 adalah sebesar 27,2 %

Tanah Kas Desa, Desa Sidomukti tidak ada tanah kas desa.

DPD/K adalah Dana pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten. Besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

SOSIAL BUDAYA

Tabel 5. Kondisi Sosial Budaya Desa

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	5562	
	B. Jumlah KK	1703	
	C. Jumlah laki-laki		
	a. 0 – 12 tahun	831	
	b. 16 – 55 tahun	1507	
	c. Diatas 55 tahun	445	
	D. Jumlah perempuan	2678	
	a. 0 – 15 tahun	816	
	b. 16 – 55 tahun	1483	
	c. Diatas 55 tahun	379	
2	Kesejahteraan Sosial		
	A. Jumlah KK Prasejahtera	187	
	B. Jumlah KK Sejahtera	241	
	C. Jumlah KK Kaya	174	
	D. Jumlah KK Sedang	353	
	E. Jumlah KK Miskin	506	
3	Tingkat Pendidikan		
	A. Tidak tamat SD	1584	
	B. SD	1781	

	C. SLTP	893	
	D. SLTA	667	
	E. Diploma/Sarjana	78	
4	Mata Pencaharian		
	A. Buruh Tani	987	
	B. Petani	1971	
	C. Peternak	2	
	D. Pedagang	343	
	E. Tukang Kayu	76	
	F. Tukang Batu	168	
	G. Penjahit	11	
	H. PNS	41	
	I. Pensiunan	4	
	J. TNI/Polri	12	
	K. Perangkat Desa	13	
	L. Pengrajin	4	
	M. Industri kecil	5	Pembuatan tempe tahu
	N. Buruh Industri	-	
	O. Lain-lain	-	
5	Agama		
	A. Islam	5304	
	B. Kristen	157	
	C. Protestan	-	
	D. Katolik	43	
	E. Hindu	-	
	F. Budha	-	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Kependudukan.

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 2861 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

Kesejahteraan

Jumlah KK Miskin mendominasi yaitu 38,48 % dari total KK, KK Sedang 23,4 %, KK pra sejahtera 6,61 %, KK sejahtera 18,4 % KK Kaya 13,24 %. dan KK Miskin. Dengan banyaknya KK miskin inilah maka Desa SIDOMUKTI termasuk dalam DESA TERTINGGAL.

Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama. Di samping itu banyak siswa putus sekolah karena kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua.

Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik.

Agama

96,43 % warga masyarakat Desa SIDOMUKTI adalah Muslim (Islam), dan 3,57% non muslim.

2.1.4. PRASARANA DAN SARANA DESA

Tabel 6. Prasarana dan Sarana Desa

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Baik
2	Balai Desa	1	Baik
3	Gedung SLTA	1	Baik
4	Gedung SLTP	1	Baik
5	Gedung SD	4	Baik
6	Gedung TK	2	baik
7	Masjid	8	Perlu perbaikan
8	Musholla	15	Perlu perbaikan
9	Gedung Bumdes	1	Masih menumpang
10	Pustu	1	Perlu perbaikan
11	Gedung Posyandu	2	Perlu perbaikan
12	Poskamling	48	Perlu Perbaikan
13	Jembatan	3	1 rusak berat
14	Gedung TPA	3	1 masih numpang
15	Pamsimas	1	Baik
16	Lapangan Volli dan Futsal	1	Baik
17	Pasar Desa	-	Tidak Ada

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Jembatan di desa Sidomukti kondisinya 1 sudah rusak parah dan saat ini mengkhawatirkan bagi pengguna jalan..

Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Semuli Raya dan Tatakarya.

Untuk pengembangan dan kemajuan BumDesa membutuhkan fasilitas gedung saat ini masih menyewa bangunan.

Secara umum prasarana dan sarana yang ada di masih kurang dan masih banyak yang perlu di perbaiki dan ditambah mengingat jumlah penduduk yang sangat besar yaitu 5562 jiwa.

KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Tabel 7. Pemerintahan DESA

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan kependudukan	Ada		
2	Pemakaman	Ada		
3	Perijinan	Ada		
4	Pasar tradisional	-	Tidak	
5	Ketentraman dan tibum	Ada		

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja dan masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk keperluan surat di laksanakan di kantor Desa.

Ada 3 (tiga) lokasi pemakaman di Desa Sidomukti. Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini.

Prosesi pemakaman dipimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga.

Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.

Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak.

Misalnya hiburan rakyat, dan orkes. Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA.

Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.

Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Semuli Raya dan Tatakarya.

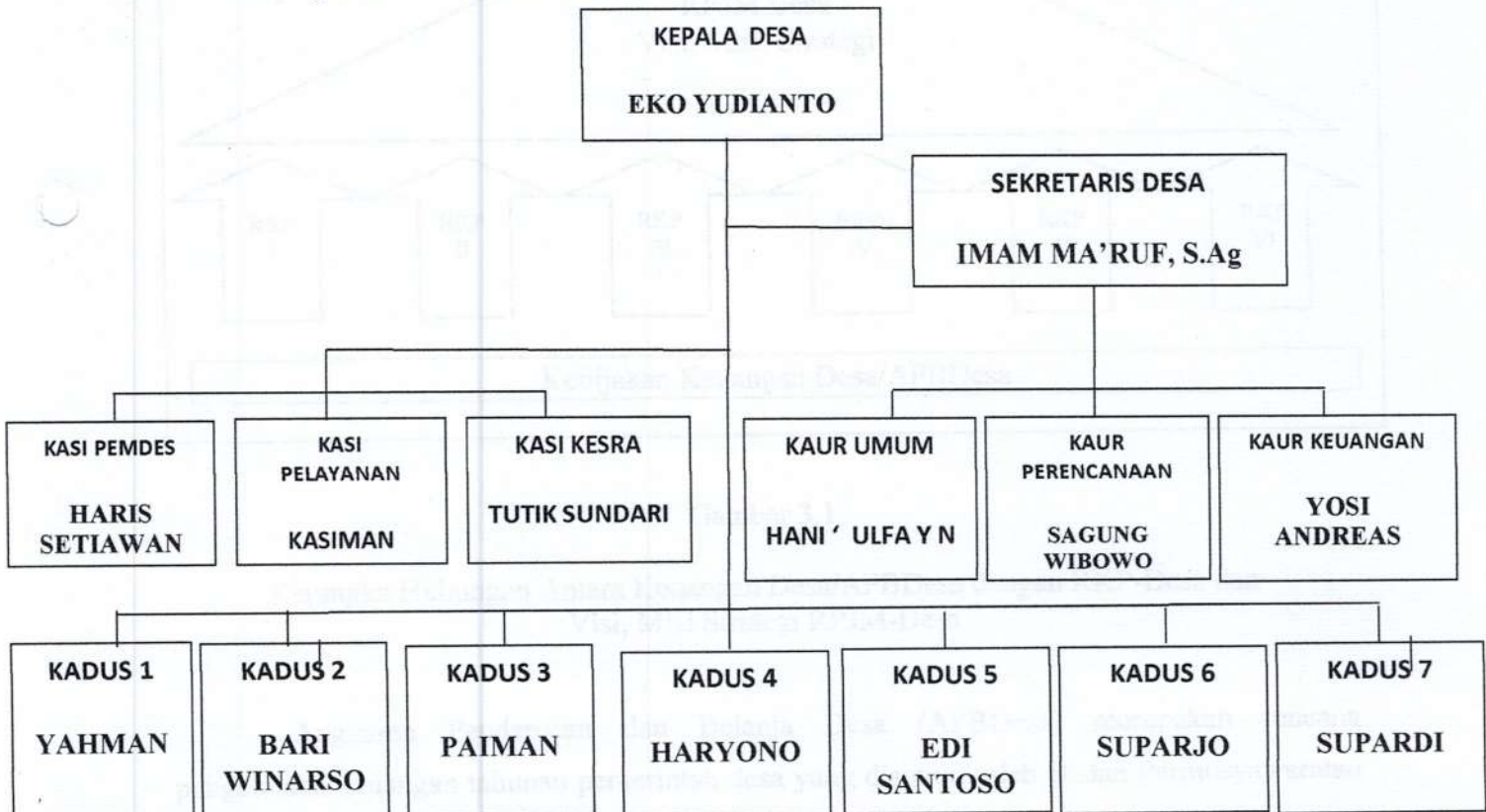
Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 16 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.

Pembagian Wilayah Desa

DESA SIDOMUKTI dengan luas 1500 ha terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun yaitu :

1. Dusun Sumber Sari (RK I)
2. Dusun Sidomukti (RK II)
3. Dusun Sidomulyo (RK III)
4. Dusun Purvosari (RK IV)
5. Dusun Purwodadi (RK V)
6. Dusun Asrikaton (RK VI)
7. Dusun Sidorejo (RK VII)

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

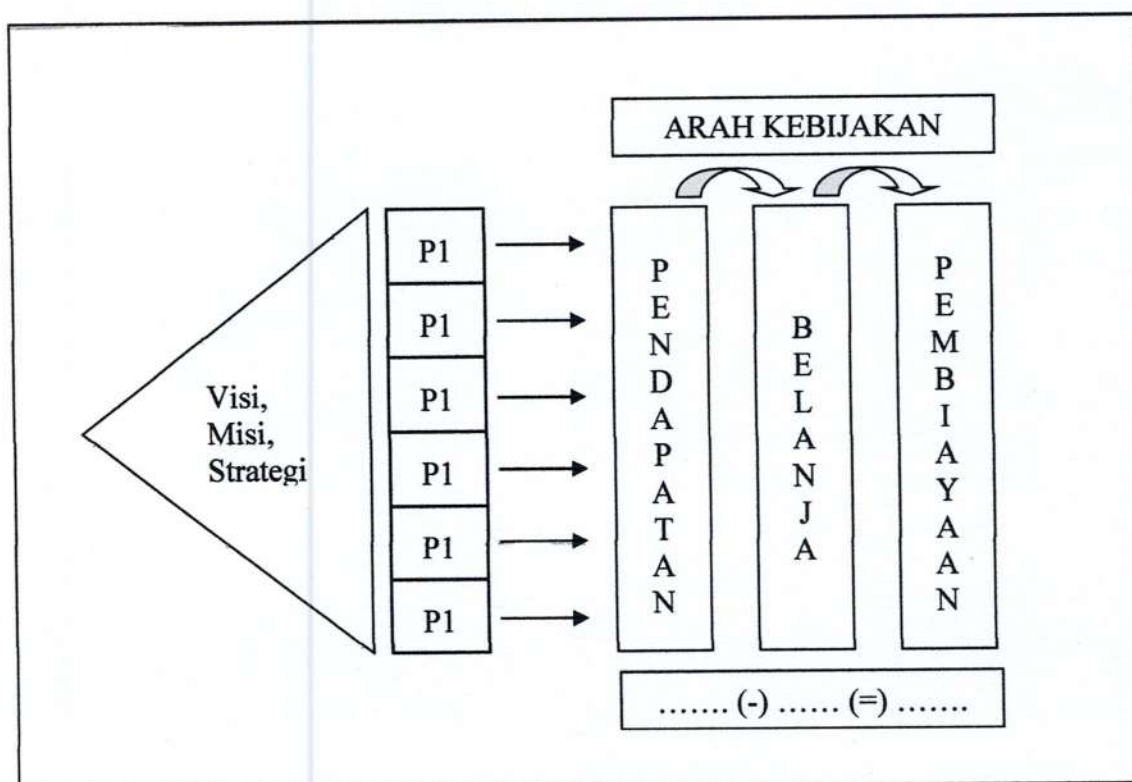


Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Sidomukti mengandung makna :

- a. Arah belanja APBDesa Sidomukti digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 6 tahunan;
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBDesa dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 3.2
Kerangka Hubungan Antara Strategi dengan Komponen APBDesa

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan desa. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Sidomukti pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber baru (*ekstensifikasi*) oleh Pemerintah Desa Sidomukti.

Mengingat bahwa komponen APBDesa menggunakan struktur surplus/defisit, maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal APBDesa mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBDesa mengalami sisa lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2028

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Sidomukti dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalan PADesa walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian. Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Sidomukti senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

3.1.2 Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Sidomukti berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip “prakiraan maju” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

BAB IV

ANALISIS DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

4.1. Permasalahan Pembangunan

Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Desa Sidomukti secara rinci sebagai berikut :

4.1.1. Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

1. Peningkatan sarana prasarana PAUD, TK dan SLTP dan SLTA;
2. lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SLTP dan SLTA;
3. Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD;
4. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, terlambatnya mengambil keputusan oleh pihak keluarga, terbatasnya bidan desa.
2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.

3. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumberdaya kesehatan.
4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia dibawah lima tahun.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli obat diluar resep dokter atau obat generik.
6. Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal.

c. Bidang Pekerjaan Umum

Jalan

1. Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada, dan masih banyaknya kerusakan.

Sampah

1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
2. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sumber Daya Air

1. Membaiknya kondisi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah.

2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.

Limbah

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di pemukiman.
2. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).

Pembangunan Saluran Drainase

1. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi bencana banjir.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase.

Penataan Lingkungan

1. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
2. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang memadai.

d. Bidang Perumahan

1. Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni, karena sebagian besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.
2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
3. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
4. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
5. Masih ada rumah yang tidak layak huni di Desa Sidomukti.
6. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
7. Belum seimbangya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.

e. Bidang Penataan Ruang

1. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

f. Perencanaan Pembangunan

1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
3. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System Perencanaan.

g. Perhubungan

1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang ada.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

h. Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.
3. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
4. Meningkatnya intensitas pemanasan global (*global warming*).
5. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
6. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

i. Pertanian

1. Program sertifikasi tanah baik dari PTSL maupun Redistribusi Tanah.
2. Pendataan ulang wajib pajak kepemilikan Tanah dan bangunan karena masih banyak data SPPT yang tidak akurat.

j. Kependudukan

1. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan sudah bagus, hal ini dapat dilihat dari bukti kepemilikan Kartu Keluarga (KK), KTP dan akte kelahiran serta dokumen kependudukan lainnya.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak cukup bagus .Hal ini ditandai dengan presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cukup baik dalam pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Tidak ada kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Masyarakat mulai menyadari begitu pentingnya mengikuti program keluarga berencana.
2. Meningkatkan Partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.
3. Sarana prasarana pelayanan KB cukup baik
4. Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I

m. Sosial

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi social masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
4. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responcibility/CSR*).

n. Ketenagakerjaan

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai dengan tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

3. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

o. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
4. Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi dan manajemen seadanya.

p. Penanaman Modal

1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investor.
2. Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan perbankan dll.

q. Kebudayaan

1. Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah sebagai asset budaya.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya untuk mengangkat citra budaya daerah.

r. Kepemudaan dan Olahraga

1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.
3. Belum optimalnya menumbuh kembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda . Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.

4. Seiring perkembangan jaman di Era serba Digital ini, anak muda bahkan sebagian orang tua sekarang menggunakan Gadget sebagai sarana komunikasi yang sangat penting
5. Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit-bibit atlet berprestasi masih kurang/rendah, dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan olahraga belum berjalan secara berkelanjutan.
6. Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga yang ada.

s. Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.
3. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

5. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
6. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam melaksanakan penanganan awal kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

t. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Desa dan Perangkat Desa

1. Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan belum memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal.
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundangundangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
5. Belum optimalnya kerjasama desa dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.

6. Belum tersusunnya Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, responsive dan akuntable belum dapat diwujudkan.

u. Ketahanan pangan

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya database potensi produksi pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan.

v. Pemberdayaan Masyarakat

1. Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan system masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
4. Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

w. Statistik

1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen dokumen lainnya.

x. Kearsipan

1. Bertahap terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, dengan memanfaatkan sarana komunikasi jaringan seluler informasi kearsipan.

2. Berupaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
3. Mengoptimalkan pemeliharaan terhadap dokumen/arsip desa dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip desa.

y. Komunikasi dan Informatika

1. Mulai mengoptimalkan sarana komunikasi melalui jaringan seluller, informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Peningkatan kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.

z. Perpustakaan

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan tebatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.

2. Belum adanya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan.

4.1.2. Pelayanan Lainnya

a. Pertanian

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena kepemilikan sawah oleh petani rata-rata $\frac{1}{4}$ hektar.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) petani.
3. Belum optimalnya peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani.
4. Belum optimalnya diverifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan hortikultura, buah-buahan dan sayuran.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani.
6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi pertanian.
7. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya pemasaran hasil pertanian.
8. Masih rendahnya hasil produksi ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
9. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak pada musim kemarau.

10. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil pertanian dan peternakan.

11. Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian.

12. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.

b. Pariwisata

1. Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di desa.

2. Belum adanya *master plan* pengembangan pariwisata berbasis pertanian (*agrowisata*) desa.

c. Perdagangan

1. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau, dan belum terintegrasinya pasar lokal.

2. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan toko kelontong dan/atau pasar tradisional yang sudah ada kurang mendapat perlindungan.

3. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.

4.2 Isu-isu Strategis

Kondisi lingkungan secara nasional saat ini yang terkait dengan isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

pada perubahan kelembagaan dan system ketatalaksanaan, kualitas sumber daya aparatur, dan system pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Sidomukti saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Sidomukti pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2022-2028), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Sidomukti sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian untuk mencapai masyarakat yang Religius, sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Desa yang mandiri berbasis pertanian** mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Sidomukti mampu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian secara luas.
- b. Adapun yang di maksud **masyarakat yang Religius** adalah masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa yang dapat hidup harmonis berdampingan dan menjadi alat perekat dan sebagai sumber spirit bangsa.
- c. Adapun yang dimaksud **masyarakat yang sehat** adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- d. Sedangkan yang dimaksud dengan **masyarakat yang cerdas** adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang secara cepat

dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

- e. Yang dimaksud **masyarakat yang lebih sejahtera** adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh tidak miskin tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan gender dan merasakan fasilitas kesehatan.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama dengan memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

5.3. Tujuan dan Sasaran

A. Untuk mencapai **misi 1**, yaitu *meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya*. Maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut :

A.1) Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian Desa dengan sasaran antara lain :

- a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi;
- b) Mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan Hortikultura secara berkelanjutan.
- c) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang pertanian.

B. Untuk mencapai **misi 2**, yaitu *meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama dengan memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas*. Maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 - 2028 adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya masyarakat desa Sidomukti yang taat beragama, Rukun, Cerdas, dan sejahtera Lahir Batin yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, harus di dukung kegiatan antara lain :

- a) Pengembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga Kerukunan Umat beragama yang harmonis.
 - b) Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan agama mulai dari usia dini, harus didukung dengan kegiatan antara lain :
- a) Menunjang akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan beragama.
 - b) Pengembangan kegiatan keagamaan sebagai saranaempererat kerukunan intra dan antar umat beragama.
- C. Untuk mencapai **misi 3**, yaitu *meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang*. maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut :
- 1) Penanggulangan terhadap penyakit menular (misal Covid -19) dengan sasaran antara lain :
- a) Melaksanakan program Vaksinasi terhadap penyakit menular
 - b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pola hidup sehat
- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan masyarakat desa sidomukti, dengan sasaran antara lain :
- a) Meningkatkan ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - b) Meningkatkan ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa.
- D. Untuk mencapai **misi 4**, yaitu *meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik*. maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022-2028 yang akan dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat desa Sidomukti
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Sidomukti
 - b) Peningkatan kedisiplinan dan kualitas pendidikan di wilayah Desa Sidomukti
- 2) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda berbagai bidang pembangunan di bidang olah raga dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna)
 - b) Meningkatkan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.
 - c) Meningkatkan prestasi olahraga di semua tingkatan.
- e). Untuk mencapai **misi 5**, yaitu *“Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa”* Maka tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan antara lain :
 - 1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
 - 2) Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan sasaran :
 - a) Meningkatkan upaya reboisasi.
 - b) Meningkatkan ketersediaan air tanah/sumber air.
 - c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

f). Untuk mencapai **misi 6**, yaitu “*Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.*” maka tujuan dan sasaran pembangunannya meliputi :

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat dengan sasaran sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya penataan administrasi kependudukan.
 - b) Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana.
 - c) Meningkatnya aktifitas pembinaan pendidikan politik masyarakat.
 - d) Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa, dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum.
 - b) Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat dengan sasaran antara lain :
 - a) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi.
 - b) Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku.
 - c) Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparatur pemerintahan desa.

5.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.1

TABEL KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI : “Terwujudnya Sidomukti sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian untuk mencapai masyarakat yang Religius, sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas. Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi; Mendorong peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan Meningkatkan kaasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dibidang Pertanian Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata. Meningkatkan peran pasar local serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri &, pariwisata Meningkatkan produktifitas dan pemasaran produk unggulan. Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian. Menguatkan kelompok tani lembaga keuangan mikro

	<p>untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.</p>		<p>pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.</p>	
	<p>(a) Saling menyadari dalam bentuk apapun, baik di bidang kerukunan umat bragama maupun gotong royong (b) Peringatan hari- hari Besar umat beragama</p>	<p>(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan dengan sesama agama maupun berbeda agama (2) Fasilitas pendukung dalam bidang pendidikan Agama</p>		
	<p>a) Pengembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan Umat Beragama yang Harmonis b) Peningkatan dan pengamalan ajaran agama</p>	<p>a) Menunjang akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan beragama. b) Pengembangan kegiatan keagamaan sebagai sarana pemererat kerukunan intra dan antar umat beragama</p>		
<p>perdagangan dan pariwisata</p>	<p>1) Terwujudnya masyarakat desa Sidomukti yang taat beragama, Rukun, Cerdas dan sejahtera lahir Batin yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong. 2) Peningkatan kualitas pendidikan agama mulai dari usia dini. 3) Peningkatan kualitas pendidikan agama mulai usia dini</p>	<p>a) Menunjang akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan beragama. b) Pengembangan kegiatan keagamaan sebagai sarana pemererat kerukunan intra</p>		
<p>2. Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama dengan memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas.</p>				

<p>3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.</p>	<p>1) Penanggulangan terhadap penyakit menular</p>	<p>dan antar umat beragama</p> <p>a) Pemberian Vaksinasi terhadap penyakit menular. b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pola hidup sehat</p>	<p>1) Penerapan prinsip hidup sehat jasmani dan Rohani. 2) Memelihara imunitas tubuh agar selalu terjaga stamina tubuh yang sehat</p>	<p>(a) Kegiatan olah raga sebagai sarana penting untuk menjaga kesehatan tubuh (b) Menjaga pola makan empat sehat lima sempurna (c) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan.</p>
<p>4. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.</p>	<p>1) Meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat desa Sidomukti. 2) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda berbagai bidang pembangunan di bidang Olah Raga</p>	<p>a) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di wilayah Desa Sidomukti. b) Peningkatan kedisiplinan dan kualitas pendidikan di wilayah Desa Sidomukti. a) Meningkatkan Revitalisasi organisasi kependudukan (Karang Taruna) b) Meningkatkan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda. c) Meningkatkan prestasi olahraga di semua tingkatan.</p>	<p>(1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa. (2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga. (3) Pembelajaran dan pengembangan terhadap seni budaya lokal maupun nasional</p>	<p>(a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan. (b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan. (c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga. (d) Peningkatan pembelajaran terhadap kesenian tradisional.</p>
<p>3) Meningkatkan penguasaan</p>	<p>a) Meningkatkan ketrampilan usaha industri kecil dan</p>	<p>a) Meningkatkan ketrampilan usaha industri kecil dan</p>	<p>a) Meningkatkan ketrampilan usaha industri kecil dan</p>	<p>a) Meningkatkan ketrampilan usaha industri kecil dan</p>

	<p>berkembangnya usaha industri.</p> <p>b) Meningkatkan dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.</p> <p>c) Meningkatkan usaha di bidang pariwisata.</p> <p>d) Meningkatkan dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.</p>	<p>berkembangnya usaha industri.</p> <p>b) Meningkatkan dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.</p> <p>c) Meningkatkan usaha di bidang pariwisata.</p> <p>d) Meningkatkan dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.</p>	
<p>5. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup</p>	<p>a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan</p>	
		<p>(1) Meningkatkan ketrampilan Sumber Daya Manusia petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.</p> <p>(2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.</p> <p>(3) Meningkatkan kerjasama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.</p> <p>(4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.</p> <p>(5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan, sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan</p>	
			<p>(a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.</p> <p>(b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, pemasaran serta kemitraan.</p> <p>(c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan saran produksi pertanian.</p> <p>(d) Memperkuat kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.</p>

dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.		d) Dalam perencanaan pembangunan desa di berbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.	pemerintahan termasuk keuangan desa.	<p>pelayanan di berbagai bidang pelayanan.</p> <p>(e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis.</p> <p>(f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.</p>
	2). Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa	<p>a) Meningkatnya upaya reboisasi.</p> <p>b) Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air.</p>		

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

6.1. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
- 4) Penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk mencapai tujuan-tujuan diatas adalah :

Misi 1:

- (1) Meningkatkan ketrampilan Sumber Daya Manusia petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan
- (3) Meningkatkan kerjasama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.

(4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.

(5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan, sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Misi 2 : Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama dengan memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas dengan tujuan :

- 1) Terwujudnya masyarakat desa Sidomukti yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan agama mulai sejak dini.

Strategi untuk mencapai **misi ke 2** dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hidup berdampingan dengan sesama agama maupun berbeda agama.
- (2) Fasilitas pendukung dalam bidang pendidikan agama.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan sebagai berikut :

- (1) Penanggulangan terhadap penyakit menular.
- (2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan masyarakat desa Sidomukti.

Strategi untuk mencapai tujuan **misi ke 3** tersebut adalah :

- (1) pemberian Vaksinasi terhadap penyakit menular
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pola hidup sehat
- (3) Meningkatkan ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa
- (4) Penerapan prinsip hidup sehat jasmani dan rohani
- (5) Memelihara imunitas tubuh agar selalu terjaga stamina tubuh yang sehat

Misi 4: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda berbagai bidang pembangunan di bidang olah raga
- 3) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk mencapai **misi ke 4** dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa.
- (2) Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
- (3) Pembelajaran dan pengembangan terhadap seni budaya lokal maupun Nasional.

Misi 5: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
- 4) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan ketrampilan Sumber Daya Manusia petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
- (2) Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
- (3) Meningkatkan kerjasama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
- (4) Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
- (5) Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Misi 6 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan :

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 3) Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kelima dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- (2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
- (3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

6.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan yang dituju secara rinci adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju antara lain :

- (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.

- (b) Meningkatkan sarana prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri &, pariwisata.
- (c) Meningkatkan produktifitas dan pemasaran produk unggulan
- (d) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kemitraan.
- (e) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian
- (f) Memperkuat kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani dan kelembagaan lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.

Misi 2: Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama dengan memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas, maka arah dan kebijakan yang akan di tuju adalah :

- a) Saling menyadari dalam bentuk apapun, baik di bidang kerukunan umat beragama maupun dalam kegiatan gotong royong.
- b) Peringatan hari hari besar umat beragama.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan dua tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah sebagai berikut :

- (a) Kegiatan olah raga sebagai sarana penting dalam menjaga kesehatan tubuh.
- (b) Menjaga pola makan, empat sehat lima sempurna.

- (c) Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan empat tujuan diatas, maka arah kebijakan yang ditempuh meliputi :

- (a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
- (b) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan.
- (c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
- (d) Peningkatan pembelajaran terhadap kesenian tradisional.

Misi 5: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka arah kebijakan yang diambil antara lain :

- (a) Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.
- (b) Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan.
- (c) Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.

- (d) Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.

Misi 6 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tiga tujuan diatas, maka arah kebijakan yang akan dituju adalah :

- (a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (b) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan.
- (e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis.
- (f) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

7.1. Kebijakan Umum

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2022-2028) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Sidomukti, maka pembangunan Desa Sidomukti dibagi menjadi *dua tahap pembangunan*, yaitu tahap perwujudan masyarakat Sidomukti yang lebih sejahtera lahir dan batin (tahun 2022-2024), dan tahap kelanjutan peningkatan pelayanan publik (tahun 2025-2028).

A. Tahapan Perwujudan Masyarakat Sidomukti yang lebih sejahtera

Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Desa Sidomukti dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Sidomukti yang lebih sejahtera (tahun 2022-2024) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
2. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
3. Penguatan ketrampilan dan kewirausahaan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Peningkatan pemerataan pembangunan.
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
7. Peningkatan program pro-rakyat (penanggulangan kemiskinan).
8. Peningkatan kesadaran hukum.

9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Pengembangan industri kecil, perdagangan dan pariwisata di bidang pertanian dalam arti luas.

B. Tahapan Kelanjutan Peningkatan Pelayanan Publik

Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Desa Sidomukti Tahun 2025-2028 serta percepatan peningkatan sumber daya manusia.

Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini (tahun 2025-2028) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum.
7. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi investor yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.

7.2. Program Pembangunan

7.2.1. Program Pelayanan Umum

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikasi

kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
- b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, media Elektronik (Sosial Media)
- c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- d) Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu.
- e) Rapat-rapat koordinasi.
- f) Rapat-rapat konsultasi keluar desa.
- g) Honorarium/belanja pegawai.
- h) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- i) Penghargaan/pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- j) Tunjangan Kesejahteraan Kepala dan Perangkat Desa.
- k) Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.
- l) Tunjangan BPD.
- m) Honorarium Tenaga Honorer Desa/Pegawai Desa.
- n) Pengadaan jasa gambar & RAB proyek fisik.
- o) Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer, kamera.
- b) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

d) Pemeliharaan Papan Informasi dan Papan Organisasi.

e) Pengadaan barang lain-lain kantor.

f) Pengadaan Belanja Lain-lain.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, indikasi kegiatan ini

meliputi :

a) Pengadaan mesin/kartu absensi.

b) Pengadaan pakaian dinas aparaturnya dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, indikasi

kegiatan ini meliputi :

a) Pendidikan dan pelatihan formal.

b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja.

b) Penyusunan laporan keuangan bulanan.

c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

d) Penyusunan dokumentasi kegiatan.

e) Pendataan, pengolahan data profil desa dan data tingkat perkembangan desa.

f) Pengadaan papan nama proyek dan prasasti kegiatan.

7.2.2. Program Pelayanan Dasar

1. Kesehatan

Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Siaga, meliputi :

- a. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat,** dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a) Pelayanan kesehatan di Polindes/Pustu.
 - b) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
 - c) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.

- b. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,** dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil.
 - b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.
 - c) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

- c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat,** dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
 - b) Pemberian makanan tambahan dan vitamin.

- c) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- d) Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi (Kadarzi).

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,

dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
- b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
- c) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita,

dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Penyuluhan kesehatan anak balita.
- b) Imunisasi bagi anak balita.
- c) Pelatihan dan/atau pendidikan perawatan anak balita.

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikasi

kegiatan antara lain :

- a) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
- b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,

dengan indikasi kegiatan :

- a) Pemberian vaksin penyakit menular
- b) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
- c) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.

d) Penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk.

h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dengan

indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.
- b) Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.

2. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan TK formal.
- b) Pemberian bantuan operasional kegiatan PAUD dan TK formal.
- c) Pengadaan perlengkapan dan mebelair sekolah
- d) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.

b. Pendidikan Dasar, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan dasar.

c. Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
- b) Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.
- c) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
- d) Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup (life skill).

3. Pekerjaan Umum

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana prasarana kepentingan umum. Kebijakan ini meliputi kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Pembangunan dan betonisasi jalan.
 - b) Pembangunan Jembatan.
- b. Program Pembangunan Saluran/drainase/Gorong-gorong/Talud/Bronjong**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Pembangunan saluran/drainase.
 - b) Pembangunan Talud/bronjong.
- c. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, dengan indikasi kegiatan :
- a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
- d. Program Pemeliharaan Saluran/drainase/gorong-gorong/talud/bronjong**, dengan indikasi kegiatan :
- a) Rehabilitasi/pemeliharaan saluran/drainase/gorong-gorong/talud/bronjong.
- e. Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**, dengan indikasi kegiatan :
- a) Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa.
 - b) Pembangunan gedung serba guna di dusun
- f. Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.
- g. Program Pembangunan, pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.

- b) Pembangunan Pompanisasi di areal pertanian
- h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana air limbah.
 - c) Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah.

4. Perumahan

Penekanan kebijakan di bidang Perumahan ini pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat, aman dan layak huni.

- a. Program Pengembangan Perumahan**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.
 - b) Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.
- b. Program Lingkungan Sehat**, dengan indikasi kegiatan diantaranya
 - a) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
 - b) Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
- c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Fasilitas pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat.
 - b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan.

- d. Program Perbaikan Perumahan** akibat bencana alam/sosial, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial.
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman**, dengan ndikasi kegiatan antara lain sebagai berikut :
- a) Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal.
 - b) Koordinasi pengelolaan dan penataan areal pemakaman.
- f. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Peningkatan antisipasi penanggulangan bahaya kebakaran.

5. Penataan Ruang

Penekanan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan perencanaan tata ruang dan kawasan desa.

- a. Program Perencanaan Tata Ruang**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
 - b) Penetapan kebijakan rencana tata ruang.
 - c) Penyusunan rencana tata ruang.
- b. Program Pemanfaatan Tata Ruang**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
- a) Penyusunan norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang.

- b) Survey dan pemetaan
 - c) Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :**
- a) Penyusunan dan penataan program pengembangan RTH.
 - b) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

6. Perencanaan Pembangunan

Penekanan kebijakan perencanaan pembangunan adalah membuat perencanaan pembangunan yang realistis dan *capable*.

- a. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan indikasi kegiatan meliputi :**
- a) Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
 - b) Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :**
- a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
 - b) Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana.
 - c) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan desa.
 - d) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan desa.

c. Program Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
- b) Penyusunan dokumen RPJM-Desa.
- c) Penyusunan Rancangan RKP-Desa.
- d) Penyelenggaraan Musrenbangdesa RPJM-Desa & RKP-Desa.

7. Lingkungan Hidup

Penekanan kebijakan disini antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungannya.

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Konservasi sumber-sumber air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber daya air.

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pengelolaan tanaman penghijauan.

c. Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan, dengan indikasi kegiatan :

- a) Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan.
- b) Pengelolaan sampah.
- c) Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola persampahan desa.

8. Perhubungan

Arah kebijakan disini adalah mengembangkan sarana prasarana transportasi, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah.

a. Program Peningkatan dan Keamanan Lalu Lintas, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Koordinasi pengadaan rambu-rambu Lalu lintas dan marka jalan.
- b) Pengadaan lampu jalan di setiap dusun

9. Pertanahan.

Penekanan kebijakannya adalah peningkatan penataan pertanahan yang legal dan tertib administrasi serta normatif.

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Penertiban penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b) Penyuluhan hukum pertanahan.

b. Program penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penekanan kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta tertib administrasi kependudukan.

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan, indikasi kegiatan ini meliputi :

- a) Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi kependudukan.
- b) Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai alat bantu pengelolaan informasi administrasi Kependudukan.
- c) Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, *updating*, pemeliharaan).
- d) Pemutahiran data penduduk secara berkelanjutan.
- e) Koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak.

a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
- b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
- c) Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d) Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.
- c. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan**
 - a) Pembinaan organisasi perempuan.
 - b) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
 - c) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.
 - d) Pemberdayaan kelembagaan yang berbasis gender.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penekanan pada kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

- a. Program Keluarga Berencana**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
 - b) Promosi pelayanan KHIBA.
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - a) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR).
 - b) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.
- c. Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Keluarga**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Penguatan kelembagan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

- b) Penguatan Kelompok Panca Bina Keluarga.
- d. **Program promosi Kesehatan Ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat**, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

13. Sosial

Kebijakan di bidang ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial.

- a. **Program pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)**, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b) Pelatihan keterampilan usaha bagi keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- b. **Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
- b) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
- c) Pemberdayaan karang taruna.

- c. **Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana**, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pelatihan kelembagaan desa tanggap bencana.
- b) Penyediaan bantuan bagi korban bencana alam.

14. Ketenagakerjaan

Sasaran kebijakan ini antara lain tersusunnya perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan yang cepat dan tepat.

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,

dengan indikasi kegiatan :

- a) Penyusunan database ketenagakerjaan.
- b) Pembangunan balai latihan kerja (BLK) Desa.
- c) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja.

b. Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,

dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
- b) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
- c) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
- a) Pengembangan kewirausahaan.
- b) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan.

15. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penekanan

kebijakan ini antara lain untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penataan kelembagaan.

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

yang Kondusif, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Penyusunan kebijakan tentang usaha mikro kecil dan menengah.
 - b) Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil dan menengah.
 - c) Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Fasilitasi pengembangan sarana prasarana promosi hasil produksi berbasis sumber daya lokal.
- c. Program Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM,** dengan indikasi kegiatan :
- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan UMKM.

16. Penanaman Modal

Penekanan kebijakan ini antara lain peningkatan dan pendayagunaan investasi pemerintah desa yang semakin merata.

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengembangan potensi unggulan desa.
 - b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- b. Program penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Desa,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi.
 - b) Pengembangan penanaman modal.
- c. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha,** dengan indikasi kegiatan :

- a) Peningkatan dan pengembangan permodalan, jaringan usaha, pengusaha, anggota simpan pinjam.
- b) Kredit usaha rakyat bagi peningkatan akses permodalan masyarakat.

17. Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/ keanekaragaman budaya.

a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
- b) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
- b) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
- c) Pembinaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana keolahragaan dan pembinaan pemuda ke arah kemandirian dan terampil dan inovatif.

a. Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a) Pengadaan kegiatan open Turnamen sepakbola kelompok umur
- b) Ikut serta dalam program turnamen tingkat propinsi

- c) Ikut serta dalam program internasional Football kelompok umur di tingkat nasional
- d) Pembinaan dan perekrutan atlit olah raga
- e) Kursus kepelatihan olahraga

b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pembinaan organisasi kepemudaan.
- b) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
- c) Peningkatan kualitas seni Pencaksilat
- d) Mengikuti event di Kejurda dan Kejurnas yang di laksanakan IPSI
- e) Perlengkapan fasilitas atlit olahraga

c. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup (*Life skill*) Pemuda, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda.
- b) Perintisan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).

d. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dengan indikasi kegiatan :

- a) Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda.

e. Program peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
- b) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

f. Program Kerjasama dan Pengembangan Pemuda, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pemberdayaan pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing dalam bidang kewirausahaan.
- b) program pencegahan pemuda terhadap bahaya Narkoba.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan di bidang ini antara lain meningkatkan rasa persatuan dan menjaga stabilitas politik yang tangguh dan dinamis serta taat hukum, sehingga dapat menjaga iklim yang kondusif.

a. Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan bangsa, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Penyuluhan kepada masyarakat.
- b) Fasilitasi/dukungan penyelenggaraan pemilihan umum.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- b) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtibmas, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengembangan dan peningkatan sistem keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b) Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

d. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dini serta Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.
- b) Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.
- c) Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk/korban bencana di penampungan.
- d) Penanganan dan evakuasi korban bencana alam.

20. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa

Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur, adil serta transparan.

a. Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- b) Rapat umum dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- c) Rapat-rapat BPD

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan desa.

- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi,**
dengan indikasi kegiatan :
- a) Pengelolaan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
 - b) Peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.
- d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,** dengan indikasi kegiatan meliputi :
- a) Penyusunan draft rancangan produk hukum desa.
 - b) Semiloka dan/atau lokakarya penyusunan kebijakan atau produk hukum.
 - a) Legislasi rancangan peraturan perundangundangan/produk hukum desa.
 - b) Fasilitasi sosialisasi Peraturan perundangundangan.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur,** dengan indikasi kegiatan antara lain :
- a) Pendidikan dan pelatihan kapasitas manajemen pemerintahan desa.
 - b) Seminar atau workshop peningkatan kinerja sumberdaya aparatur.
 - c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

f. Program Koordinasi bidang Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikasi kegiatan berupa :

- a) Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
- b) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- c) Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).
- d) Pelelangan/sewa pengelolaan tanah kas desa.

21. Ketahanan Pangan dan Hewani

Penekanan kebijakan ini menjaga stabilitas harga pangan dan distribusi pangan agar sesuai dengan ketentuan dan aspek legalitas.

a. Program Kecukupan Ketersediaan Pangan, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Program pengembangan berbagai jenis potensi produk pangan.
- b) Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan.

b. Program Stabilitas Kesediaan Pangan, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengembangan Lumbung Pangan.
- b) Perintisan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan.

c. Program Stabilitas Ketersediaan Pangan, dengan indikasi kegiatan :

- a) Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.

d. Peningkatan kualitas/ keamanan pangan dan Hewani, dengan
indikasi kegiatan antara lain :

- a) Pengembangan peternakan rakyat dan kreasi pangan olahan yang sehat.

22. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu berswasembada dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

a. Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan :

- a) Peningkatan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pembinaan kelompok masyarakat (Pokmas) Pembangunan Desa.
- b) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa).

c. Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Peningkatan dan penambahan modal Badan Usaha Milik Desa.
- b) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan dan bidang peternakan rakyat.

c) Pelatihan ketrampilan usaha-usaha ekonomi produktif.

d. Program Pengembangan Data, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pendataan dan pengolahan data profil desa/ tingkat perkembangan desa.

- b) Pendataan dan pengisian data monografi desa.

23. Statistik

Kebijakan ini menekankan pada peningkatan ketersediaan data yang canggih dan aktual serta dapat mudah diakses secara cepat dan tepat.

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Desa, dengan

indikasi kegiatan :

- a) Pendataan jumlah penduduk.
- b) Penyusunan dan pengumpulan data serta pengolahan (*updating*) statistik desa dan PDRB.

24. Kearsipan

Penekanan kebijakan ini antara lain untuk menyiapkan kearsipan dan penyimpanan secara bertanggungjawab, normatif dan aman.

a. Program Perbaikan, Penyelamatan dan Pelestarian

Administrasi Kearsipan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Pengumpulan dan pengklasifikasian data/dokumen kearsipan.
- b) Pengadaan sarana penyimpanan.
- c) Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data.
- d) Pengadaan otomasi arsip aktif dan in-aktif.

b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip desa.
- b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kearsipan.

25. Komunikasi dan Informatika

Penekanan arah kebijakan ini antara lain peningkatan kualitas informasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

a. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi, dengan

indikasi kegiatan :

- a) Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan Komunikasi dan Informasi.
- b) Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui *website* resmi desa.

26. Perpustakaan

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana perpustakaan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembaca.

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan, dengan indikasi kegiatan :

- a) Pengembangan minat dan budaya baca.
- b) Pengembangan SDM tenaga pengelola perpustakaan desa.

b. Program Pelestarian dan Penyelamatan Koleksi Pustaka,

dengan indikasi kegiatan :

- a) Pendataan karya cetak dan karya rekam.
- b) Pelestarian karya cetak dan karya rekam.

7.2.3. Program Pelayanan Lainnya

1. Pertanian

Penekanan kebijakan bidang pertanian menitikberatkan pada upaya pengembangan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha serta produk pertanian.

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Perbaikan berbagai jalan usaha tani
- b) Peningkatan kemampuan lembaga petani.
- c) Pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani.
- d) Rehabilitasi jaringan irigasi.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan sarana prasarana pemasaran/promosi atas hasil produksi pertanian.

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, dengan indikasi kegiatan :

- a) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
- b) Penanggulangan air pertanian (Pompanisasi) di areal pertanian

d. Program Pengembangan Pertanian Organik dan Pengembangan Agribisnis, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- a) Kegiatan penanganan panen, pasca panen dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- b) Fasilitas pendukung program tanaman Hortikultura

e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani, dengan indikasi kegiatan meliputi :

- a) Pengembangan kapastisas Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan).

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sidomukti Tahun 2022-2028 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana prioritas program dan kegiatan-kegiatan mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

8.1. Indikasi Program Prioritas

A. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian Desa

- 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan**
 - a. Pembangunan Betonisasi jalan
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 2. Program Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemukiman dan Penataan Ruang**
 - a. Pembangunan saluran air/drainase/goronggorong/talud/bronjong.
- 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air**
 - a. Pembangunan sarana prasarana air tanah (POMPANISASI) di areal pertanian.

4. Program pembangunan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Produksi

- a. Pemanfaatan teknologi informatika dalam pemasaran secara online.

B. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

- a. Penyuluhan kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
- b. Perawatan berkala kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu
- c. Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- a. Pelayanan kesehatan dasar gratis di Polindes.
- b. Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RSUD.

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin.
- b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- a. Pemberian Vaksinasi terhadap penyakit menular
- b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menula
- c. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.
- d. Penyemprotan Fogging nyamuk.

C. Pengembangan Pendidikan Bermutu dan Berkualitas

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- a. Peningkatan pendidikan berazaskan agama

- b. Peningkatan Sarana prasarana Sekolah.
- c. Bantuan operasional kegiatan pendidikan.

2. Program Pendidikan Dasar

- a. Peningkatan pendidikan di bidang keagamaan
- b. Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan.

3. Program Pendidikan Non Formal

- a. Pembangunan Gedung Sekolah Non Formal.
- b. Pemberian Bantuan operasional kegiatan.
- c. Pengembangan dan peningkatan pendidikan berbasis agama.

4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

- a. Pengembangan sarana prasarana olahraga.

5. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda

- a. Pembinaan kelembagaan pemuda.
- b. Pelatihan Dasar Kepemimpinan.
- c. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.

D. Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan Mendorong Tumbuh dan Berkembangnya Pembangunan di Bidang Pertanian Dalam Arti Luas.

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian

- a. Peningkatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian dalam arti luas.
- b. Penyediaan sarana produksi dalam arti luas.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit

- a. Penyuluhan dan pendampingan petani dalam menangani hama tanaman dan pelaku agribisnis.
- b. Peningkatan pencegahan hama tanaman pangan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Produktivitas serta Pembukaan Lapangan Kerja

- a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta meningkatkan daya saing desa.
- b. Jaminan kepastian hukum berusaha.
- c. Pengembangan perekonomian lokal.

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, UMKM

- a. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.
- b. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah.

5. Program Peningkatan Promosi Produksi dan Perdagangan

- a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah serta perdagangan terhadap pemanfaatan sumber daya.

6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja.
- b. Pelatihan ketrampilan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja.

E. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Aparatur

- a. Pembangunan Gedung-gedung Perkantoran Lembaga Desa.
- b. Penambahan peralatan teknologi komunikasi dan komputer untuk pengolahan data.
- c. Menambah perangkat lunak (*software*) program olah data.
- d. Mengadakan reformasi birokrasi.
- e. Meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.

- f. Menerapkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan bagi aparatur pemerintah dengan menerapkan sanksi yang tegas.
- g. Meningkatkan profesionalisme aparatur sehingga tercipta pemerintah desa yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis.

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
- b. Peningkatan program website Desa untuk olah data kependudukan.

3. Program Pelayanan Keluarga Berencana

- a. Peningkatan kegiatan KB Mandiri.
- b. Pengembangan kelembagaan KB dalam bidang social ekonomi.

4. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

- a. Revitalisasi kebudayaan /menghidupkan kembali budaya dan kesenian lokal sejak dini.

5. Program Peningkatan Politik Masyarakat

- a. Revitalisasi pusat informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat.
- b. Memantapkan stabilitas sosial politik di masyarakat.
- c. Koordinasi forum-forum diskusi publik.
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD.
- e. Peningkatan pelayanan fungsi BPD

6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbangdes.
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek gender.

7. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan desa.
- b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan/atau bintek regulasi pengelolaan keuangan desa.

8. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Peningkatan tingkat swadaya masyarakat.
- c. Pemberian bantuan operasional lembaga kemasyarakatan.

F. Peningkatan Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Program Pengelolaan Persampahan

- a. Perintisan sarana prasarana pengelolaan persampahan.
- b. Pelatihan manajemen pengelolaan persampahan.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pelestarian Burung Hantu (*tyto alba*) sebagai predator hama tikus di areal persawahan.
- c. Peningkatan pelaksanaan reboisasi.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Indikator-indikator yang ditetapkan dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Desa Sidomukti dalam kurun tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut :

9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan ekonomi) (%)
2. Persentase Penduduk dibawah garis kemiskinan (%)
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah)
2. Angka Melek Huruf (%)
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
4. Angka Harapan Hidup (Tahun)
5. Angka Partisipasi Kasar (%) : PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
6. Angka Partisipasi Murni (%) : PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
7. Angka Kematian Ibu
8. Angka Kematian Bayi
9. Persentase Penduduk yang memiliki lahan (%)
10. Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang bekerja (%)

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Jumlah Group Kesenian
2. Jumlah Group Olahraga

9.2. Aspek Pelayanan Dasar

1. Kesehatan

- a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
- b. Cakupan pertolongan persalinan (%)
- c. Cakupan kunjungan bayi (%)
- d. Cakupan pelayanan anak balita (%)
- e. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 24 bulan (%)
- f. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
- g. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (%)

- h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC (%)
- i. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%)
- j. Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin (%)
- k. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)
- l. Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)
- m. Persentase Gizi buruk (%)

2. Pendidikan

- a. Persentase anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program PAUD dan TK/RA.
- b. Persentase APM SD/MI
- c. Persentase APM SMP/MTs
- d. Persentase Angka Putus Sekolah SD
- e. Persentase Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs
- f. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs
- g. Persentase Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA
- h. Persentase APM SMA/SMK/MA
- i. Persentase penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis
- j. Jumlah orang buta aksara usia 15-44 tahun.
- k. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui terus menerus.

3. Pekerjaan Umum

- a. Panjang jalan (km)
- b. Persentase panjang jalan kondisi baik (%)
- c. Persentase jembatan kondisi baik (%)
- d. Persentase saluran/drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)
- e. Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik (%)

4. Perumahan

- a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)
- b. Jumlah areal pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit)

5. Penataan Ruang

- a. Jumlah bangunan ber-IMB (unit)
- b. Jumlah Gapura (unit)

6. Perencanaan Pembangunan

- a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa 6 (enam) tahunan (unit)
- b. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa 1 (satu) tahunan (unit)

7. Lingkungan Hidup

- a. Persentase pengelolaan sampah (%)
- b. Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)

8. Pertanahan

- a. Persentase luas lahan bersertifikat (%)

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Persentase kepemilikan akte kelahiran (%)
- b. Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)
- c. Persentase kepemilikan Kkbagi setiap keluarga (%)

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Jumlah kasus KDRT (kasus)
- b. Cakupan anak yang berhadapan hukum yang mendapat perlindungan/restoratif justice (kasus)

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Cakupan pasangan usia subur usia di bawah 20 tahun (%)
- b. Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%)
- c. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB (%)

12. Sosial

- a. Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)
- b. Persentase PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama atau sejenis (%)

13. Ketenagakerjaan

- a. Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)
- b. Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)
- c. Tingkat pengangguran terbuka (%)

14. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)
- b. Persentase koperasi aktif (%)

15. Kebudayaan

- a. Jumlah kelompok seni (unit)

16. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Jumlah Kelompok Pemuda produktif (kelompok)

17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)

18. Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa

- a. Persentase pelaksanaan fungsi BPD
- b. Jumlah Perdes yang ditetapkan (buah)
- c. Waktu penyelesaian buku APBDesa (bulan)

19. Ketahanan Pangan

- a. Penguatan cadangan pangan

20. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (%)
- b. Persentase Posyandu aktif (%)

21. Statistik

- a. Buku profil desa/tingkat perkembangan desa (buah)

22. Kearsipan

- a. Persentase arsip yang diolah dengan baik (%)

23. Komunikasi dan Informatika

- a. Jumlah SDM pengelola Website berkeahlian teknologi informasi

24. Perpustakaan

- a. Jumlah pengunjung perpustakaan desa (pengunjung)
- b. Jumlah koleksi (rekam dan cetak) perpustakaan desa.

9.3. Aspek Pelayanan Lainnya

1. Pertanian

- a. Nilai Tukar Petani
- b. Produksi tanaman pangan utama : padi, jagung dan Singkong
- c. Produksi tanaman hortikultura utama : cabe merah, Bayam, Kangkung, Terong, Pare, Kacang Panjang, Timun, semangka, melon dll.
- d. Jumlah kelompok tani.

BAB X

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1. Kaidah Pelaksanaan

Keterbukaan dan pertanggungjawaban merupakan kunci sukses pembangunan baik jangka pendek, maupun jangka menengah, mengingat dengan terciptanya keterbukaan, maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akan terwujud.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sidomukti tahun 2022-2028 diharapkan sebagai acuan perwujudan visi, misi dan program-program pembangunan Kepala Desa terpilih. Penyusunan RPJM-Desa ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024, dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara fungsi pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sidomukti Tahun 2022-2028 antara lain bahwa dokumen RPJM-Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) setiap tahunnya dalam periode yang sama. Disamping itu, RPJM-Desa ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) setiap Akhir Tahun dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) dan menjadi dasar bagi BPD dan masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan di Desa Sidomukti sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap, mental, etika, tekad dan semangat serta ketaatan para penyelenggara pemerintah desa. Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomukti dalam mewujudkan visi **“Terwujudnya Sidomukti sebagai Desa yang mandiri berbasis pertanian untuk mencapai masyarakat yang Religius, sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”** Perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan desa yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah desa, (3) keberpihakan pembangunan pada masyarakat, (4) peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Sidomukti, (5) menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan pembangunan desa.

10.2. Pedoman Transisi

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa jo. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan, maka RPJMDesa Sidomukti Tahun 2015-2020 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RKP-Desa dan Rancangan APBDesa Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih periode berikutnya (tahun 2022-2028) hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2021.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

BAB XI

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa kami susun dan kebutuhan mendesak pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana alam / Pandemi virus Corona sejak tahun 2019 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan, kegiatan belajar mengajar siswa sekolah pun tidak bisa dilakukan secara tatap muka untuk memutus Rantai Penyebaran Virus Corona. Mau tidak mau Pemerintah Desa harus menganggarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa Untuk Membantu meringankan kebutuhan pokok penduduk, adapun rencana program pembangunan berupa Bangunan Fisik maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong-royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Karena program ini hanya untuk 6 tahun, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana prasarana yang ada, selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan kepala Desa silih berganti.

Demikian program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai penyusunan dan perencanaan.

Sidomukti,.....
Kepala Desa Sidomukti



EKO YUDIANTO

HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

Desa : Sidomukti
 Kecamatan : Abung Timur
 Kabupaten : Lampung Utara

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1	Jalan RT 01,02,05 RK I sepanjang 1500 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase belum ada	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan Onderlagh
2	Jalan Usaha Tani RT 01 RK I sepanjang 600 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase belum ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan Onderlagh
3	Jalan Usaha Tani RT 03 RK I sepanjang 1500 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase belum ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan Onderlagh
4	Jalan Usaha Tani RT 03 RK I Sepanjang 2000 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase belum ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan Onderlagh
5	Drainase RT 01 RK I Sepanjang 600 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor 3. Jalan masih tanah	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
6	Drainase RT 02 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
7	Drainase RT 03 RK I Sepanjang 700 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
8	Drainase RT 04 RK I Sepanjang 900 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
9	Drainase RT 05 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
10	Drainase RT 06 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
11	Drainase RT 07 RK I Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
12	Belum adanya Poskamling yang permanendi RT 01,06,07 RK I	Poskamling masih kayu	1. Lahan ada 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Poskamling permanen	Pembangunan Poskamling
13	Kelompok simpan pinjam kurang permodalan	Modal kecil	1. Kelompok ada 2. Usaha ada	Penambahan Modal Usaha	Penambahan Modal Usaha
14	Halaman Musholla At-Taqwa RK I masih becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Masyarakat	Pavingisasi Halaman Musholla	Pavingisasi Halaman Musholla
15	Drainase Di sekeliling lapangan RK 2 belum permanen	1. Lapangan becek 2. Kekurangan Bola	1. Lapangan ada 2. Anak Remaja	1. Draenase sekeliling lapangan 2 Bantuan Bola, Kostum	-Pembangunan siring pasang Lapangan Bola dan Pengadaan Bola, Kostum
16	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 1	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura
17	Halaman Masjid Al-Hidayah RK I masih becek	1. Halaman masih tanah	1. Swadaya masyarakat	Pavingisasi Halaman Masjid	Pavingisasi Halaman Masjid

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
18	Jalan Menuju ke Makam RT 07 RK I sering longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Pembangunan Draenase
19	Lapangan Sepak bola RK 01 rusak	1. Tanah bergelombang 2. Rumput kurang baik	1. Lapangan ada 2. Swadaya Tenaga	Perataan Lapangan	Perataan Lapangan
20	Kurangnya modal usaha bagi pemuda dan masyarakat	Modal Kecil	Usaha ada	Penambahan Modal Usaha UKM	Penambahan Modal Usaha UKM
21	Pagar pembatas Masjid Al-Hidayah RK 01 belum ada	Tanah Timbun Belum Rata	1. Swadaya Masyarakat	Perataan tanah	Pembangunan Pagar pembatas halaman Masjid
22	Belum adanya Gedung TPA di RK II	Kekurangan Dana	1. Swadaya Masyarakat	Pembangunan Gedung TPA	Pembangunan Gedung TPA
23	Masih minimnya APE di BKB dan PAUD	1. Kegiatan kurang berjalan 2. Kekurangan dana	1. Balita 2. Kader PKK		
24	Minimnya peralatan kesenian	1. Peralatan kurang 2. Kekurangan dana	SDM ada	Bantuan peralatan Kesenian Karawitan	Bantuan peralatan Kesenian Karawitan
25	Jalan penghubung RK II dan RK VI sepanjang 1800 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
26	Jalan Penghubung RK II Ke RK IV sepanjang 2500 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
27	Jalan Usaha Tani RT 01 RK II sepanjang 800 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
28	Jalan Usaha Tani RT 06 RK II Sepanjang 1500 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
29	Drainase RT 01 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
30	Drainase RT 02 RK II Sepanjang 600 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
31	Drainase RT 03 RK II Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
32	Drainase RT 04 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
33	Drainase RT 05 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
34	Drainase RT 06 RK II Sepanjang 800 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
35	Drainase RT 07 RK II Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
36	Drainase RT 08 RK II Sepanjang 550 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
37	Pada Musim Kemarau kekurangan air bersih	1. Tidak ada mata air 2. Sungai kering	1. Lahan 2. Swadaya tenaga	Pembangunan sumur bor dan MCK	Pembangunan sumur bor dan MCK
38	Posyandu belum ada tempat/gedung	1. Gedung tidak ada 2. kekurangan dana	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu 3. Lahan	Pembangunan gedung posyandu	Pembangunan gedung posyandu
39	Kelompok Tani Kurang Permodalan	Kekurangan modal	1. Lahan 2. Kelompok tani	Bantuan Modal usaha, Benih, Pupuk dan obat-obatan	Bantuan Modal usaha, Benih, Pupuk dan obat-obatan
40	Saat Musim tanam padi belum ada sarana untuk menanam	Tanam cara manual	1. Lahan 2. Kelompok tani	Bantuan pengadaan mesin tanam otomatis	Bantuan pengadaan mesin tanam otomatis
41	Halaman Musholla Al-Ikhlash RK II masih becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pavingisasi Halaman Musholla	Pavingisasi Halaman Musholla
42	Petani kekurangan bibit ternak sapi	Kekurangan Modal	1. Kandang 2. Kelompok	Bantuan pengadaan ternak sapi potong	Bantuan pengadaan ternak sapi potong
43	Kelompok simpan pinjam kurang permodalan	Kekurangan modal usaha	1. Kelompok SPP 2. Usaha ada	Penambahan modal usaha kelompok simpan pinjam	Penambahan modal usaha kelompok simpan pinjam
44	Sarana dan prasarana olah raga kurang memadai	1. Bola tidak ada 2. Kostum tidak ada 3. Lapangan rusak	SDM	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
45	Anak Remaja Kurang memiliki keahlian ketrampilan	1. BLK tidak ada 2. Kemauan kurang	SDM	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
46	Jalan Usaha Tani RT 03 RK III sepanjang 750 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
47	Jalan Usaha Tani RT 04 RK III sepanjang 1500 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
48	Jalan Usaha Tani RT 05 RK III sepanjang 1000 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
49	Drainase RT 01 RK III Sepanjang 900 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
50	Drainase RT 02 RK III Sepanjang 450 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
51	Drainase RT 03 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
52	Drainase RT 04 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
53	Drainase RT 05 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
54	Gedung Madin & TPQ RK III belum layak	1. Lokal belajar kurang 2. Kekurangan Dana	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung Madin dan TPQ RK III	Pembangunan Gedung Madin dan TPQ III
55	Belum adanya Gapura Jalan utama RK III	1. Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura
56	Halaman Madin & TPQ RK III masih becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pavingisasi Halaman Musholla	Pavingisasi Halaman Musholla
57	Belum adanya Lapangan Volly di RK III	1. Dukungan warga kurang 2. Kekurangan dana	1. Lahan ada 2. SDM 3. Swadaya Tenaga	Pembangunan Lapangan Volly	Pembangunan Lapangan Volly
58	Mebelair di Madin dan TPQ RK III kurang memadai	1. Mebelair rusak 2. Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pengadaan Mebelair Madin dan TPQ RK III	Pengadaan Mebelair Madin dan TPQ RK III
59	Balai Desa rusak	1. Kurang terawat 2. Kekurangan Dana	Swadaya Tenaga	Pembangunan rehab Balai Desa	Pembangunan rehab Balai Desa
60	Belum adanya Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	Kekurangan Dana	Swadaya Tenaga	Pembangunan Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD)	Pembangunan Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD)
61	Belum adanya pagar pembatas tanah utara Kantor Desa	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan pagar kantor desa	Pembangunan pagar kantor desa
62	Jalan Usaha Tani RT 01 RK IV sepanjang 1500 m rusak dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
63	Belum adanya Poskamling yang permanen di RT 01,03,04 RK IV	Poskamling masih kayu	1. Lahan ada 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Poskamling permanen	Pembangunan Poskamling
64	Drainase RT 01 RK IV Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
65	Drainase RT 02 RK IV Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
66	Drainase RT 03 RK IV Sepanjang 400 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
67	Drainase RT 04 RK IV Sepanjang 500 m kurang baik	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
68	Belum adanya Gapura Jalan utama RK IV	1. Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura
69	Halaman Musolla An-Nur RK IV masih becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pavingisasi Halaman Musholla	Pavingisasi Halaman Musholla
70	Onderlagh Jalan Penghubung RK III dan RK VI sepanjang 1200 m rusak	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase ada	1. Jalan Onderlagh 2. Swadaya Tenaga	1. Pengaspalan Jalan 2. Penalutan Drainase	Pengaspalan Jalan
71	Lapangan Bola volly di RK IV rusak	1. Tanah bergelombang 2. Jaring tidak ada	1. Lapangan ada 2. Swadaya Tenaga	Perbaikan Lapangan dan pengadaan jaring	Perbaikan Lapangan dan pengadaan jaring

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
72	Drainase batas RK IV menuju RK V sepanjang 900 m kurang lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
73	Onderlagh Jalan Penghubung RK III dan RK IV sepanjang 1600 m rusak	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase ada	1. Jalan Onderlagh 2. Swadaya Tenaga	1. Pengaspalan Jalan 2. Penalutan Drainase	Pengaspalan Jalan dan Penalutan Drainase
74	Jalan Penghubung RK II dan RK VI sepanjang 1800 m rusak dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
75	Jalan Usaha Tani RT 05 RK V sepanjang 1500 m longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
76	Jalan Usaha Tani RT 08 RK V sepanjang 1600 m longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
77	Jalan Usaha Tani RT 08 RK V sepanjang 300 m longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
78	Jalan penghubung RK V dan RK VI sepanjang 2000 m becek dan longsor	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
79	Mebelair Madin dan TPQ Qomarul Hidayah kurang memadai	1. Mebelair rusak 2. Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pengadaan Mebelair Madin dan TPQ Qomarul Hidayah	Pengadaan Mebelair Madin dan TPQ Qomarul Hidayah
80	Gedung Madin dan TPQ Qomarul Hidayah Kurang Memadai	1. Lokal belajar kurang 2. Kekurangan Dana	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung Madin dan TPQ Qomarul Hidayah	Pembangunan Gedung Madin dan TPQ Qomarul Hidayah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
81	Drainase RT 01-A RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
82	Drainase RT 01-B RW 05 sepanjang 700 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
83	Drainase RT 02 RW 05 sepanjang 800 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
84	Drainase RT 03 RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
85	Drainase RT 04 RW 05 sepanjang 400 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
86	Drainase RT 05 RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
87	Drainase RT 06 RW 05 sepanjang 500 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
88	Drainase RT 07 RW 05 sepanjang 500 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
89	Drainase RT 08 RW 05 sepanjang 400 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
90	Halaman Masjid Darussalam RK V masih becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pavingisasi Halaman Masjid	Pavingisasi Halaman Masjid
91	Jalan Usaha Tani RT 02 RK VI sepanjang 600 m longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
92	Jalan Menuju Makam RT 05 RK VI sepanjang 800 m longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
93	Halaman Masjid Nurul Iman RK VI masih becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pavingisasi Halaman Musholla	Pavingisasi Halaman Musholla
94	Belum adanya Rumah Pengelolaan Bank Sampah	1. Kekurangan Dana 2. Kesadaran Masy jurang	1. Lahan 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Bank Sampah	Pembangunan Bank Sampah
95	Drainase RT 01 RK VI sepanjang 500 m tidak lancer	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
96	Drainase RT 02 RW VI sepanjang 500 m tidak lancer	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
97	Drainase RT 03 RW VI sepanjang 600 m tidak lancer	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
98	Drainase RT 04 RW VI sepanjang 400 m tidak lancer	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
99	Drainase RT 05 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
100	Drainase RT 06 RW VI sepanjang 600 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
101	Drainase RT 07 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
102	Drainase RT 08 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
103	Halaman Musolla Al-Istiqomah masih becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pavingisasi Halaman Musholla	Pavingisasi Halaman Musholla
104	Halaman Gereja Katolik RK VI becek	1. Halaman masih tanah 2. Sering turun hujan	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pavingisasi Halaman Gereja	Pavingisasi Halaman Gereja
105	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK I	1. Rumah papan/geribik 2. RTSM	Swadaya Tenaga	Pemugaran rumah tak layak huni	Pemugaran rumah tak layak huni
106	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK II	1. Rumah papan/geribik 2. RTSM	Swadaya Tenaga	Pemugaran rumah tak layak huni	Pemugaran rumah tak layak huni
107	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK III	1. Rumah papan/geribik 2. RTSM	Swadaya Tenaga	Pemugaran rumah tak layak huni	Pemugaran rumah tak layak huni

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
108	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK IV	1. Rumah papan/geribik 2. RTSM	Swadaya Tenaga	Pemugaran rumah tak layak huni	Pemugaran rumah tak layak huni
109	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK V	1. Rumah papan/geribik 2. RTSM	Swadaya Tenaga	Pemugaran rumah tak layak huni	Pemugaran rumah tak layak huni
110	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK VI	1. Rumah papan/geribik 2. RTSM	Swadaya Tenaga	Pemugaran rumah tak layak huni	Pemugaran rumah tak layak huni
111	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK VII	1. Rumah papan/geribik 2. RTSM	Swadaya Tenaga	Pemugaran rumah tak layak huni	Pemugaran rumah tak layak huni
112	Jalan Usaha Tani RT 02 RK VII sepanjang 450 m longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
113	Jalan Usaha Tani RT 07 RK VII sepanjang 800 m longsor dan becek	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase blm ada 3. Jalan masih tanah	1. Badan Jalan 2. Swadaya Tenaga	1. Perkerasan Jalan 2. Pembuatan Drainase	Perkerasan Jalan
114	Drainase RT 01 RK VII sepanjang 400 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
115	Drainase RT 02 RK VII sepanjang 900 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
116	Drainase RT 03 RK VII sepanjang 400 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
117	Drainase RT 04 RK VII sepanjang 700 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
118	Drainase RT 05 RK VII sepanjang 850 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
119	Drainase RT 06 RK VII sepanjang 600 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
120	Drainase RT 07 RK VII sepanjang 650 m tidak lancar	1. Kondisi geografis 2. Saluran Drainase longsor	1. Drainase ada 2. Swadaya Tenaga	Penalutan/Siring Pasang	Penalutan/Siring Pasang
121	Gedung Posyandu di RK VII belum ada	Tidak ada gedung	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu 2. Lahan	Pembangunan Gedung Posyandu	Pembangunan Gedung Posyandu
122	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK VII	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura
123	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK VI	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura
124	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK V	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura
125	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK II	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
126	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK III	Kekurangan Dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gapura	Pembangunan Gapura
127	Belum adanya Lampu Penerangan Jalan Utama	1. Kurang kesadaran masyarakat 2. Kurang dana	1. Swadaya Dana 2. Swadaya Tenaga	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
128	Hama tikus sering merajalela	1. Banyak tikus 2. Banyak semak	1. Poktan 2. Swadaya Tenaga	Pompanisasi	Pompanisasi
129	Hama tanaman menyerang tanaman petani	1. Benih kurang baik 2. Obat mahal	1. Poktan 2. Penyuluh	Optimalisasi penyuluhan petani ttg penanganan hama tanaman	Optimalisasi penyuluhan petani ttg penanganan hama tanaman
130	Harga gabah pada saat panen merosot	1. Banyak tengkulak 2. Pemasaran susah	1. Produksi banyak 2. Poktan ada 3. Gapoktan ada	Penambahan Modal Usaha Gapoktan	Penambahan Modal Usaha Gapoktan
131	Tanam padi belum ada mesin tanam otomatis	1. Tenaga Manusia 2. Musim tanam bersamaan	1. Lahan 2. Poktan ada 3. Penyuluh	Bantuan Mesin tanam otomatis	Bantuan Mesin tanam otomatis
132	Kelompok Tani kurang modal usaha	1. Pupuk Mahal 2. Obat-obatan mahal	1. Lahan 2. Poktan ada 3. Penyuluh	Bantuan Modal, Pupuk, dan obat-obatan Kelompok Tani	Bantuan Modal, Pupuk, dan obat-obatan Kelompok Tani
133	Obat-obatan sangat mahal	Kekurangan modal	1. Lahan 2. Poktan ada	Bantuan Modal, Pupuk, dan obat-obatan Kelompok Tani	Bantuan Modal, Pupuk, dan obat-obatan Kelompok Tani
134	Belum ada mesin panen otomatis	1. Peralatan manual 2. Kehilangan hasil	1. Lahan 2. Poktan ada 3. SDM	Bantuan Mesin Panen Otomatis/Comben Mini	Bantuan Mesin Panen Otomatis/Comben Mini

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
135	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	1. Bibit ternak mahal 2. Kekurangan modal	1. Kandang 2. Swadaya Tenaga	Bantuan Ternak Sapi Potong dan bebek	Bantuan Ternak Sapi Potong dan bebek
136	Usaha kecil kurang modal	Kekurangan modal	1. Kelompok UKM 2. Pasar	Penguatan Modal Kelompok Usaha Kecil	Penguatan Modal Kelompok Usaha Kecil
137	Belum adanya Gedung PAUD	Belum ada gedung	1. SDM 2. Lahan ada 3. Swadaya Tenaga	Pembangunan Gedung PAUD	Pembangunan Gedung PAUD
138	Belum adanya lembaga latihan kerja di Desa	1. Banyak Pengangguran 2. Belum ada BLK	1. SDM 2. Lahan ada 3. Swadaya Tenaga	Pendirian Balai Latihan Kerja	Pendirian Balai Latihan Kerja
139	Minat Baca Masyarakat masih rendah	1. Perpustakaan Belum ada 2. SDM rendah	1. SDM 2. Lahan 3. Swadaya Tenaga	Pembangunan Perpustakaan Desa	Pembangunan Perpustakaan Desa
140	Penggunaan Teknologi Informasi Masih rendah	Warnet Desa belum ada	1. SDM 2. Lahan 3. Swadaya Tenaga	Pengembangan Website Desa dan PPID	Pengembangan Website Desa dan PPID
141	Minimnya peralatan kesenian	1. Peralatan belum ada 2. Kurang Dana	1. SDM 2. Lahan 3. Swadaya Tenaga	Pengadaan Peralatan Kesenian Jaranan/Reog	Pengadaan Peralatan Kesenian Jaranan/Reog
142	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	Tidak ada insentif	1. Kader Posyandu 2. Kegiatan ada	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu	Pemberian Kesejahteraan Kader Posyandu
143	Banyaknya warga yang tereserang diare pada musim pancaroba	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penyuluhan Kes	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan	Pencegahan Penyakit Diare Melalui Penyuluhan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
144	Banyaknya warga yang terserang DBD	1. Kurang Kesadaran Masy 2. Kurang Penuluhan Kes 3. Musim Pancaroba	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pengadaan Fogging pada musim penghujan	Pengadaan Fogging pada musim penghujan
145	Belum adanya subsidi untuk balita dan lansia	Kurang Penuluhan Kesehatan	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Pemberian PMT untuk balita dan lansia	Pemberian PMT untuk balita dan lansia
146	Pelayanan kader posyandu belum maksimal	1. Fasilitas kurang 2. Kesadaran kurang	1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu	Optimalisasi Kader Posyandu melalui pelatihan	Optimalisasi Kader Posyandu melalui pelatihan
147	Belum semua Perangkat Desa aktif dalam kegiatan di masyarakat	1. Fasilitas kurang 2. Kesadaran kurang	1. Perangkat Desa	Peningkatan keaktifan Perangkat Desa dlm keg.masy	Peningkatan keaktifan Perangkat Desa dlm keg.masy
148	Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Kurang Pemahaman	1. Perangkat Desa 2. Administrasi ada	Pelatihan manajemen tupoksi Perangkat Desa	Pelatihan manajemen tupoksi Perangkat Desa
149	Belum adanya tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	Belum ada tunjangan Kes	Perangkat Desa	Pemberian tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	Pemberian tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa
150	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	Kurang pemahaman tentang tata kelola kearsipan	Perangkat Desa	Pelatihan tata pemerintahan Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD	Pelatihan tata pemerintahan Desa bagi perangkat desa, BPD, LPMD
151	Minimnya penyerapan aspirasi dari masyarakat oleh BPD	1. Anggota kurang aktif 2. Kesadaran kurang	Anggota BPD ada	Pengaktifan kegiatan anggota BPD	Pengaktifan kegiatan anggota BPD
152	Hubungan BPD dengan masyarakat belum optimal	1. Anggota kurang aktif 2. Kesadaran kurang	Anggota BPD ada	Pengaktifan kegiatan anggota BPD	Pengaktifan kegiatan anggota BPD

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
153	Belum adanya seragam pengurus RT / RW	Kurang dana	SDM	Pengadaan seragam pengurus RT/RW	Pengadaan seragam pengurus RT/RW
154	Administrasi RT / RW belum rapi	1. Buku administrasi tidak ada 2. Kesadaran kurang	SDM	Pelatihan tata kelola administrasi RT/RW	Pelatihan tata kelola administrasi RT/RW
155	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	1. Anggota kurang aktif 2. Kesadaran	SDM	Penguatan PKK	Penguatan PKK
156	Kelompok Tani belum aktif sepenuhnya	1. Anggota kurang aktif 2. Kesadaran kurang 3. Pengurus kurang aktif	1. Kelompok Tani 2. Anggota	Pelatihan manajemen pengurus Kel. Tani	Pelatihan manajemen pengurus Kel. Tani
157	Lemahnya keterlibatan linmas dalam transtib warga	1. Anggota kurang aktif 2. Kesadaran kurang	SDM	Penguatan organisasi Linmas	Penguatan organisasi Linmas
158	Keterlibatan LPMD dlm pembangunan di desa belum optimal	1. Anggota kurang aktif 2. Kesadaran kurang	SDM	Penguatan peran dan fungsi LPMD	Penguatan peran dan fungsi LPMD
159	Minimnya Sarana dan Prasarana Kegiatan Karang Taruna	Kurangnya Modal	SDM	Penguatan Modal, peran dan fungsi Karang Taruna	Penguatan peran dan fungsi Karang Taruna
160	Masih adanya pengangguran di kalangan Pemuda	1. Putus sekolah 2. Kurang keterampilan	SDM	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
161	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba	Tidak ada penyuluhan	SDM	Penyuluhan bahaya miras dan narkoba	Penyuluhan bahaya miras dan narkoba
162	Kurangnya sarpras keolahragaan	1. Tidak ada dana 2. Kurang Fasilitas	SDM	Pengadaan fasilitas olahraga	Pengadaan fasilitas olahraga
163	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ	Insentif kurang	SDM	Peningkatan kesejahteraan guru keagamaan	Peningkatan kesejahteraan guru keagamaan
164	Kurangnya kesejahteraan Imam Masjid	1. Belum ada insentif	SDM	Peningkatan kesejahteraan Imam masjid	Peningkatan kesejahteraan Imam masjid
165	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	1. Kesadaran Masy kurang 2. Insentif	SDM	Peningkatan kegiatan pembinaan mental	Peningkatan kegiatan pembinaan mental

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

Desa : Sidomukti
 Kecamatan : Abung Timur
 Kabupaten : Lampung Utara

NO	MASALAH	Dirasakan Oleh Orang Banyak	Sangat Parah	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jalan RT 01,02,05,06,07 RK I sepanjang 1500 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	25	3
2	Jalan Usaha Tani RT 01 RK I sepanjang 600 m rusak dan longsor	5	4	5	5	5	24	42
3	Jalan Usaha Tani RT 03 RK I sepanjang 1500 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	25	15
4	Jalan Usaha Tani RT 03 RK I Sepanjang 2000 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	25	37
5	Drainase RT 01 RK I Sepanjang 600 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	63
6	Drainase RT 02 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	71
7	Drainase RT 03 RK I Sepanjang 700 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	82
8	Drainase RT 04 RK I Sepanjang 900 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	89
9	Drainase RT 05 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	96
10	Drainase RT 06 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	103
11	Drainase RT 07 RK I Sepanjang 400 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	108
12	Belum adanya Poskamling yang permanendi RT 01,06,07 RK I	4	4	1	3	5	17	150
13	Halaman Musholla At-Taqwa RK I masih becek	5	3	1	4	5	18	135

14	Belum adanya Gapura Jalan utama RK I	4	4	1	3	5	17	136
15	Halaman Masjid Al-Hidayah RK I masih becek	5	3	1	4	5	18	134
16	Jalan Menuju ke Makam RT 07 RK I sering longsor dan becek	5	5	5	5	5	25	36
17	Lapangan Sepak bola rusak	4	4	1	2	5	16	151
18	Bangunan Masjid Al-Hidayah RK I belum rapi	5	3	1	4	5	18	133
19	Belum adanya Gedung TPA di RK I	5	5	2	5	5	22	52
20	Jalan penghubung RK II dan RK VI sepanjang 1800 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	25	1
21	Jalan RT 06,08 RK II Ke RK IV sepanjang 2500 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	25	2
22	Jalan Usaha Tani RT 01 RK II sepanjang 800 m rusak dan longsor	5	4	5	5	5	25	35
23	Jalan Usaha Tani RT 06 RK II Sepanjang 1500 m rusak dan longsor	5	4	5	5	5	24	40
24	Drainase RT 01 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	72
25	Drainase RT 02 RK II Sepanjang 600 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	83
26	Drainase RT 03 RK II Sepanjang 400 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	90
27	Drainase RT 04 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	97
28	Drainase RT 05 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	104
29	Drainase RT 06 RK II Sepanjang 800 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	109
30	Drainase RT 07 RK II Sepanjang 400 m kurang baik	5	4	3	4	4	20	64

31	Drainase RT 08 RK II Sepanjang 550 m kurang baik	5	4	3	4	4	4	20	113
32	Pada Musim Kemarau kekurangan air bersih	5	5	5	5	5	5	25	16
33	Gedung Posyandu perlu perbaikan	5	5	3	5	5	5	23	51
34	Halaman Musholla Al-Ikhlas RK II masih becek	5	3	1	4	5	5	18	132
35	Belum adanya Poskamling yang permanen di RT 01,02,03,04,05 RK II	4	4	1	3	5	5	17	149
36	Jalan Usaha Tani RT 03 RK III sepanjang 750 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	5	25	38
37	Jalan Usaha Tani RT 04 RK III sepanjang 1500 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	5	25	34
38	Jalan Usaha Tani RT 05 RK III sepanjang 1000 m rusak dan longsor	5	5	5	5	5	5	25	10
39	Drainase RT 01 RK III Sepanjang 900 m kurang baik	5	4	3	4	4	4	20	65
40	Drainase RT 02 RK III Sepanjang 450 m kurang baik	5	4	3	4	4	4	20	73
41	Drainase RT 03 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	5	4	3	4	4	4	20	84
42	Drainase RT 04 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	5	4	3	4	4	4	20	91
43	Drainase RT 05 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	5	4	3	4	4	4	20	98
44	Gedung Madin & TPQ RK III belum layak	5	4	3	4	4	5	21	62
45	Perlu adanya Lapen di jalan 2 di sepanjang RK 3	4	4	1	3	5	5	17	138
46	Halaman Madin & TPQ RK III masih becek	5	3	1	4	5	5	18	131
47	Mebelair di Madin dan TPQ RK III kurang memadai	5	4	2	4	4	4	19	117

65	becek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	18
66	Jalan Usaha Tani RT 08 RK V sepanjang 300 m longsor dan becek Jalan penghubung RK V dan RK VI sepanjang 2000 m becek dan longsor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	24	41
67	Mebelair Madin dan TPQ Qomarul Hidayah kurang memadai	5	5	4	4	2	3	3	4	4	19	119
68	Gedung Madin dan TPQ Qomarul Hidayah Kurang Memadai	5	5	3	3	3	4	4	4	5	20	70
69	Drainase RT 01-A RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	67
70	Drainase RT 01 RW 05 sepanjang 700 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	86
71	Drainase RT 02 RW 05 sepanjang 800 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	93
72	Drainase RT 03 RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	100
73	Drainase RT 04 RW 05 sepanjang 400 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	105
74	Drainase RT 05 RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	75
75	Drainase RT 06 RW 05 sepanjang 500 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	110
76	Drainase RT 07 RW 05 sepanjang 500 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	114
77	Drainase RT 08 RW 05 sepanjang 400 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	116
78	Halaman Masjid Darussalam RK V masih becek	5	5	3	3	1	4	4	4	5	18	129
79	Jalan Usaha Tani RT 02 RK VI sepanjang 600 m longsor dan becek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	29
80	Jalan Menuju Makami RT 05 RK VI sepanjang 800 m longsor dan becek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	12
81	Halaman Masjid Nurul Iman RK VI masih becek	4	4	3	3	1	4	4	4	5	17	140
82	Belum adanya Rumah Pengelolan Bank Sampah	5	5	3	3	1	3	3	3	4	16	54
83	Drainase RT 01 RK VI sepanjang 500 m tidak lancar	5	5	4	4	3	4	4	4	4	20	68

84	Drainase RT 02 RK VI sepanjang 500 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	76
85	Drainase RT 03 RW VI sepanjang 600 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	87
86	Drainase RT 04 RW VI sepanjang 400 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	94
87	Drainase RT 05 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	101
88	Drainase RT 06 RW VI sepanjang 600 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	106
89	Drainase RT 07 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	111
90	Drainase RT 08 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	115
91	Halaman Musolla Al-Istiqomah masih becek	5	3	1	4	5	18	128
92	Halaman Gereja Katolik RK VI becek	5	3	1	4	5	18	127
93	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK I	5	5	5	5	5	25	19
94	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK II	5	5	5	5	5	25	20
95	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK III	5	5	5	5	5	25	21
96	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK IV	5	5	5	5	5	25	22
97	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK V	5	5	5	5	5	25	23
98	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK VI	5	5	5	5	5	25	24
99	Masih banyaknya Rumah tidak layak huni di RK VII	5	5	5	5	5	25	25
100	Jalan Usaha Tani RT 02 RK VII sepanjang 450 m longsor dan becek	5	5	5	5	5	25	26
101	Jalan Usaha Tani RT 07 RK VII sepanjang 800 m longsor dan becek	5	5	5	5	5	25	11

102	Drainase RT 01 RK VII sepanjang 400 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	69
103	Drainase RT 02 RK VII sepanjang 900 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	77
104	Drainase RT 03 RK VII sepanjang 400 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	88
105	Drainase RT 04 RK VII sepanjang 700 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	95
106	Drainase RT 05 RK VII sepanjang 850 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	102
107	Drainase RT 06 RK VII sepanjang 600 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	107
108	Saluran Irigasi berlumpur dan longsor	5	5	5	5	5	25	39
109	Drainase RT 07 RK VII sepanjang 650 m tidak lancar	5	4	3	4	4	20	112
110	Gedung Posyandu di RK VII belum ada	5	5	3	5	5	23	49
111	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK VII	4	4	1	3	5	17	144
112	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK VI	4	4	1	3	5	17	145
113	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK V	4	4	1	3	5	17	143
114	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK II	4	4	1	3	5	17	141
115	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK III	4	4	1	3	5	17	142
116	Belum adanya Lampu Penerangan Jalan Utama	5	4	1	4	5	19	120
117	Hama tikus sering merajalela	5	4	5	4	5	23	48
118	Hama tanaman menyerang tanaman petani	5	5	5	5	5	25	27
119	Harga gabah pada saat panen merosot	5	5	5	5	5	25	28

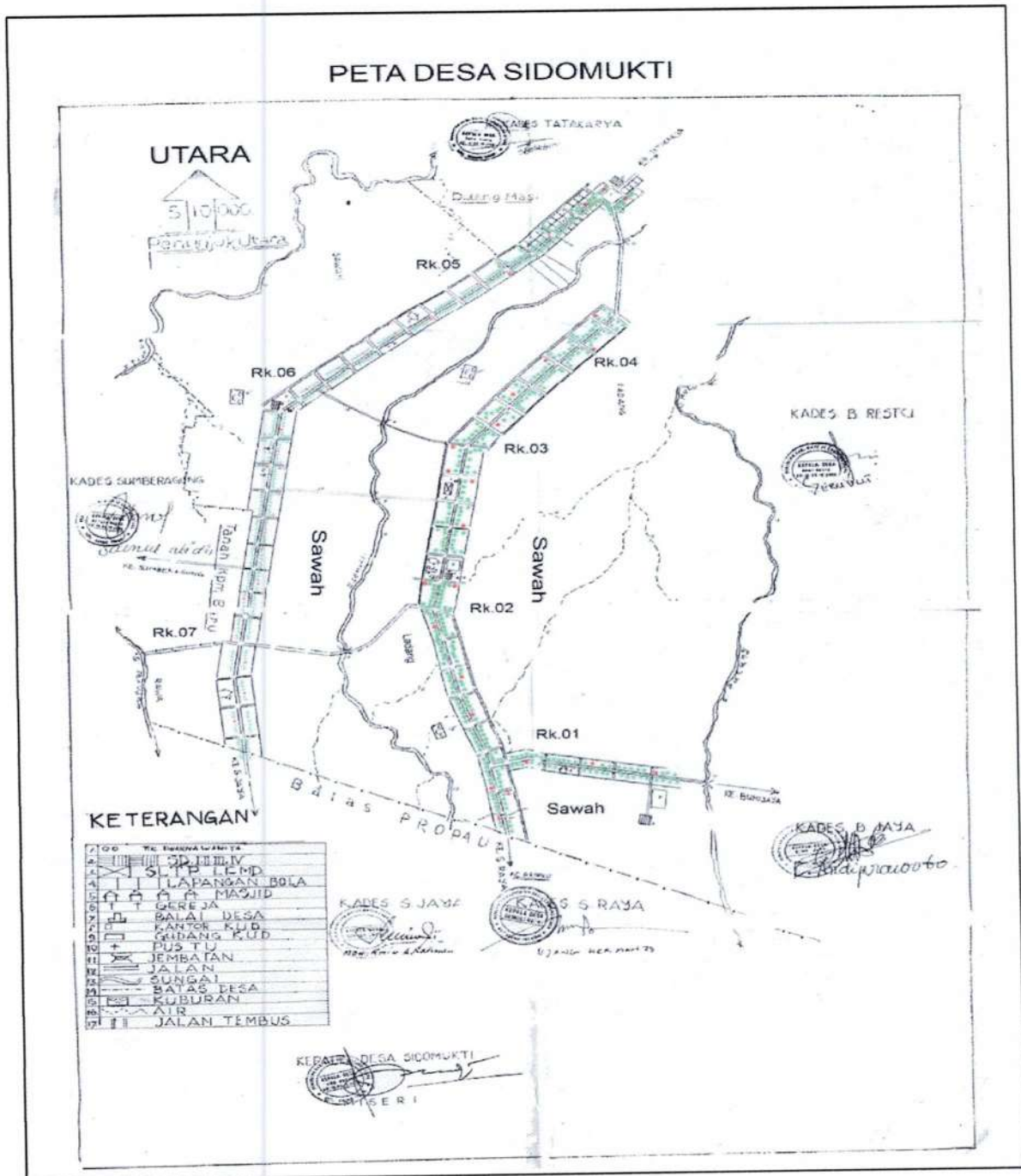
120	Harga pupuk yang semakin mahal	5	5	5	5	5	5	5	5	25	5
121	Kelompok Tani kurang modal	5	5	5	5	5	5	5	5	25	7
122	Obat-obatan sangat mahal	5	5	4	5	5	5	5	4	23	50
123	Kurangnya Ketersediaan air pertanian	5	5	5	5	5	5	5	5	25	30
124	Kurangnya modal untuk usaha peternakan/perikanan	5	5	5	5	5	5	5	5	25	6
125	Usaha kecil kurang modal	4	4	4	5	5	4	4	4	21	61
126	Perbaikan Gedung PAUD	5	5	4	4	4	4	4	5	22	53
127	Belum adanya latihan kerja di bidang pertanian	4	4	2	4	4	3	3	3	16	155
128	Minat Baca Masyarakat masih rendah	5	5	5	3	3	5	5	5	23	47
129	Penggunaan Teknologi Informasi Masih rendah	5	5	4	5	5	5	5	5	24	43
130	Minimnya minat pemuda di bidang kesenian tradisional	5	5	3	4	4	4	4	5	21	59
131	Kurangnya kesejahteraan kader Posyandu	4	4	4	3	3	5	5	5	21	60
132	Banyaknya warga yang terserang diare pada musim pancaroba	5	5	4	3	3	4	4	4	20	78
133	Banyaknya warga yang terserang DBD	5	5	4	3	3	4	4	4	20	79
134	Banyak warga yang terserang penyakit menular	5	5	3	3	3	3	3	5	19	121
135	Pelayanan kader posyandu belum maksimal	5	5	3	2	2	3	3	4	17	146
136	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	5	5	2	3	3	3	3	4	17	147
137	Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	4	4	4	3	3	4	4	4	19	122

138	Belum adanya tunjangan kesehatan bagi Perangkat Desa	4	4	4	4	4	5	5	22	54
139	Administrasi Pemerintah Desa belum rapi	4	4	4	2	5	5	5	20	80
140	Peningkatan penanganan penyakit menular	5	4	4	2	5	5	5	21	58
141	Pengoptimalan Hubungan BPD dengan Masyarakat	5	3	3	2	4	4	4	18	126
142	Ketua RT belum mempunyai program kerja lingkungan	5	5	5	5	5	5	5	25	31
143	Belum meningkatnya kualitas RT / RW	5	4	4	2	5	5	5	21	57
144	Administrasi RT / RW belum rapi	4	4	4	1	4	5	5	18	125
145	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	5	4	4	3	4	5	5	21	56
146	Kelompok Tani belum dapat menjadi aspirasi petani	5	4	4	5	4	5	5	23	46
147	Lemahnya keterlibatan linmas dalam transtib warga	4	4	4	1	4	4	4	17	148
148	Keterlibatan LPMD dlm pembangunan di desa belum optimal	5	3	3	3	4	5	5	20	81
149	Kegiatan Karang Taruna belum sepenuhnya berjalan	5	5	5	2	5	5	5	22	55
150	Banyaknya pengangguran di kalangan Pemuda	5	5	5	5	5	5	5	25	32
151	Kurangnya pemahaman terhadap bahaya Miras dan Narkoba	5	3	3	1	2	5	5	16	153
152	Belum maksimalnya sarpras keolahragaan	5	3	3	2	4	5	5	19	123
153	Kurangnya kesejahteraan guru ngaji, TPQ, Madin	4	4	4	5	5	5	5	23	44
154	Kurangnya kesejahteraan imam Masjid	4	4	4	5	5	5	5	23	45
155	Kurangnya kegiatan pembinaan mental kepada warga	5	3	3	3	3	4	4	18	124

Jumlah usulan peringkat : 155

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET/SKETSA DESA

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan RT 01,02,05,06,07 RK I sepanjang 1500 m rusak dan longsor	- Swadaya Masyarakat
2.	Jalan Usaha Tani RT 01 RK I sepanjang 600 m rusak dan longsor	- Swadaya Masyarakat
3.	Jalan Usaha Tani RT 03 RK I sepanjang 1500 m rusak dan longsor	- Swadaya Masyarakat
4.	Jalan Usaha Tani RT 03 RK I Sepanjang 2000 m rusak dan longsor	- Swadaya Tenaga
5.	Drainase RT 01 RK I Sepanjang 600 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
6.	Drainase RT 02 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
7.	Drainase RT 03 RK I Sepanjang 700 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
8.	Drainase RT 04 RK I Sepanjang 900 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
9.	Drainase RT 05 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
10.	Drainase RT 06 RK I Sepanjang 500 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
11.	Drainase RT 07 RK I Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
12.	Belum adanya Poskamling yang permanen di RT 01,06,07 RK I	- Swadaya Tenaga
14.	Kelompok tani kurang permodalan	- Anggota - Klp Tani
15.	Halaman Musholla At-Taqwa RK I masih becek	- Swadaya Tenaga
16.	Sarana dan prasarana olah raga kurang memadai	- Lapangan - Anak Remaja
17.	Belum adanya Gapura Jalan utama RK 1	Swadaya Tenaga
18.	Halaman Masjid Al-Hidayah RK I masih becek	Swadaya Masyarakat
19.	Jalan Menuju ke Makam RT 07 RK I sering longsor dan becek	- Swadaya Masyarakat
20.	Lapangan Sepak bola di RK 1 tidak terawat	Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
21	Kurangnya modal usaha bagi pemuda dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Kegiatan Usaha
22.	Bangunan Masjid Al-Hidayah RK 1 kurang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
23.	Belum adanya Gedung TPA di RK II	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
24.	Masih minimnya APE di BKB dan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Administrasi
25.	Minimnya peralatan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Administrasi
26.	Jalan onderlagh penghubung RK II dan RK VI sepanjang 1800 m rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
27.	Jalan RT 06,08 RK II Ke RK IV sepanjang 2500 m rusak dan longsor	Swadaya Masyarakat
28.	Jalan Usaha Tani RT 01 RK II sepanjang 800 m rusak dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
29.	Jalan Usaha Tani RT 06 RK II Sepanjang 1500 m rusak dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
30.	Drainase RT 01 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
31.	Drainase RT 02 RK II Sepanjang 600 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
32.	Drainase RT 03 RK II Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
33.	Drainase RT 04 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
34.	Drainase RT 05 RK II Sepanjang 500 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
35.	Drainase RT 06 RK II Sepanjang 800 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
36.	Drainase RT 07 RK II Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
37.	Drainase RT 08 RK II Sepanjang 550 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
38.	Pada Musim Kemarau kekurangan air bersih	- Swadaya Masyarakat
39.	Belum ada gedung Posyandu di RW 007	- Swadaya Masyarakat
40.	Kelompok Tani Kurang Permodalan	- Kelompok Tani

NO	MASALAH	POTENSI
41	Kekurangan air saat musim tanam Tiba	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Irigasi - Poktan
42.	Musholla Al-Ikhlas RK II	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
43.	Belum adanya Poskamling yang permanen di RT 01,02,05 RK II	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
44.	Petani membutuhkan Pencacah pakan Ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan - Rumput - Pakan ternak
45.	Pengembangan modal Badan Usaha Milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Kegiatan Usaha
46.	Sarana dan prasarana olah raga kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Usia Remaja
47.	Anak Remaja Kurang memiliki keahlian ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Administrasi
48.	Jalan Usaha Tani RT 03 RK III sepanjang 750 m rusak dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
49.	Jalan Usaha Tani RT 04 RK III sepanjang 1500 m rusak dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
50.	Jalan Usaha Tani RT 05 RK III sepanjang 1000 m rusak dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
51.	Drainase RT 01 RK III Sepanjang 900 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
52.	Drainase RT 02 RK III Sepanjang 450 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
53.	Drainase RT 03 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
54.	Drainase RT 04 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
55.	Drainase RT 05 RK III Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
56.	Belum adanya pagar pembatas di masjid Almuhajirin RK 3	- Swadaya Tenaga
57.	Belum adanya Gapura Jalan utama RK III	- Swadaya Masyarakat
58.	Halaman Madin & TPQ RK III masih becek	- Swadaya Masyarakat
59.	Belum adanya Gedung Serba Guna di RK 3	- Swadaya Tenaga
60.	Mebelair di Madin dan TPQ RK III kurang memadai	- Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
61.	Halaman balai Desa Masih Becek	- Swadaya MAsyarakat
62.	Belum adanya Kantor lembaga-lembaga desa (PKK, LPMD, BPD, Karang Taruna, Perpustakaan Desa)	- Swadaya Masyarakat
63.	Belum adanya pagar pembatas tanah utara Balai Desa	- Swadaya Masyarakat
64.	Jalan Usaha Tani RT 01 RK IV sepanjang 1500 m rusak dan longsor	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
65.	Belum adanya Poskamling yang permanen di RT 01 RK IV	- Swadaya Masyarakat
66.	Drainase RT 01 RK IV Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
67.	Drainase RT 02 RK IV Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
68.	Drainase RT 03 RK IV Sepanjang 400 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
69.	Drainase RT 04 RK IV Sepanjang 500 m kurang baik	- Swadaya Masyarakat
70.	Belum adanya Gapura Jalan utama RK IV	- Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
71.	Halaman Musolla An-Nur RK IV masih becek	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
72.	Onderlagh Jalan Penghubung RK III dan RK VI sepanjang 1200 m rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya MASYarakat
73.	Gorong- gorong Air banyak yang belum ada	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
74.	Drainase batas RK IV menuju RK V sepanjang 900 m kurang lancar	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
75.	Onderlagh Jalan Penghubung RK III dan RK IV sepanjang 1600 m perlu di Lapen	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Masyarakat
76.	Jalan Onderlagh Penghubung RK II dan RK VI sepanjang 1800 m perlu di Lapen	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
77.	Jalan Usaha Tani RT 05 RK V sepanjang 1500 m longsor dan becek	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
78.	Jalan Usaha Tani RT 08 RK V sepanjang 1600 m longsor dan becek	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
79.	Jalan Usaha Tani RT 08 RK V sepanjang 300 m longsor dan becek	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
80.	Jalan penghubung RK V dan RK VI sepanjang 2000 m becek dan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
81	Mebelair Madin dan TPQ Qomarul Hidayah kurang memadai	- Swadaya Masyarakat
82.	Gedung Madin dan TPQ Qomarul Hidayah Kurang Memadai	- Swadaya Masyarakat
83.	Drainase RT 01-A RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
84.	Drainase RT 01-B RW 05 sepanjang 700 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
85.	Drainase RT 02 RW 05 sepanjang 800 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
86.	Drainase RT 03 RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
87.	Drainase RT 04 RW 05 sepanjang 400 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
88.	Drainase RT 05 RW 05 sepanjang 600 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
89.	Drainase RT 06 RW 05 sepanjang 500 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
90.	Drainase RT 07 RW 05 sepanjang 500 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
91.	Drainase RT 08 RW 05 sepanjang 400 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
92.	Halaman Masjid Darussalam RK V perlu di Vaping Blok	- Swadaya Masyarakat
93.	Jalan Usaha Tani RT 02 RK VI sepanjang 600 m longsor dan becek	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
94.	Jalan Menuju Makam RT 05 RK VI sepanjang 800 m	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
95.	Halaman Masjid Nurul Iman RK VI masih becek	- Swadaya Masyarakat
96.	Belum adanya Rumah Pengelolaan Bank Sampah	- Swadaya Tenaga - Swadaya Masyarakat
97.	Drainase RT 01 RK VI sepanjang 500 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
98.	Drainase RT 02 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
99.	Drainase RT 03 RW VI sepanjang 600 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
100.	Drainase RT 04 RW VI sepanjang 400 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
101	Drainase RT 05 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
102.	Drainase RT 06 RW VI sepanjang 600 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
103.	Drainase RT 07 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
104.	Drainase RT 08 RW VI sepanjang 500 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
105.	Halaman Musolla Al-Istiqomah masih becek	- Swadaya Tenaga - Swadaya Masyarakat
106.	Halaman Gereja Katolik RK VI becek	- Swadaya Masyarakat
107.	Masih ada Rumah tidak layak huni di RK I	- Swadaya Tenaga
108.	Masih ada Rumah tidak layak huni di RK II	- Swadaya Tenaga
109.	Masih ada Rumah tidak layak huni di RK III	- Swadaya Tenaga
110.	Masih ada Rumah tidak layak huni di RK IV	- Swadaya Tenaga

NO	MASALAH	POTENSI
111.	Masih ada Rumah tidak layak huni di RK V	- Swadaya Tenaga
112.	Masih ada Rumah tidak layak huni di RK VI	- Swadaya Tenaga
113.	Masih ada Rumah tidak layak huni di RK VII	- Swadaya Tenaga
114.	Jalan Usaha Tani RT 02 RK VII sepanjang 450 m longsor dan becek	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
115.	Jalan Usaha Tani RT 07 RK VII sepanjang 800 m longsor dan becek	- Tanah urug - Badan Jalan - Swadaya Masyarakat
116.	Drainase RT 01 RK VII sepanjang 400 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
117.	Drainase RT 02 RK VII sepanjang 900 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
118.	Drainase RT 03 RK VII sepanjang 400 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
119.	Drainase RT 04 RK VII sepanjang 700 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat
200.	Drainase RT 05 RK VII sepanjang 850 m tidak lancar	- Swadaya Masyarakat

NO	MASALAH	POTENSI
201.	Drainase RT 06 RK VII sepanjang 600 m tidak lancar	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
202.	Drainase RT 07 RK VII sepanjang 650 m tidak lancar	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Swadaya Masyarakat
203.	Gedung Posyandu di RK VII belum ada	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
204.	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK VII	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
205.	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK VI	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
206.	Belum adanya Gapura Jalan Utama RK V	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
207.	Belum adanya Lampu Penerangan Jalan Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya Dana - Swadaya Tenaga
208.		
209.		
210.		

2. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Gagal Panen	-	-	-	***	***	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	****	**	-	-	-	-	-
Banyak warga terkena penyakit ISPA	***	***	**	-	****	****	-	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
Banyak warga terkena Diare	*	*	-	-	-	-	-	-	***	**	-	***
Kesehatan (banyak penyakit)	*	****	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panen	****	****	-	-	-	-	-	-	****	****	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	****	****	-	-	****	****	-

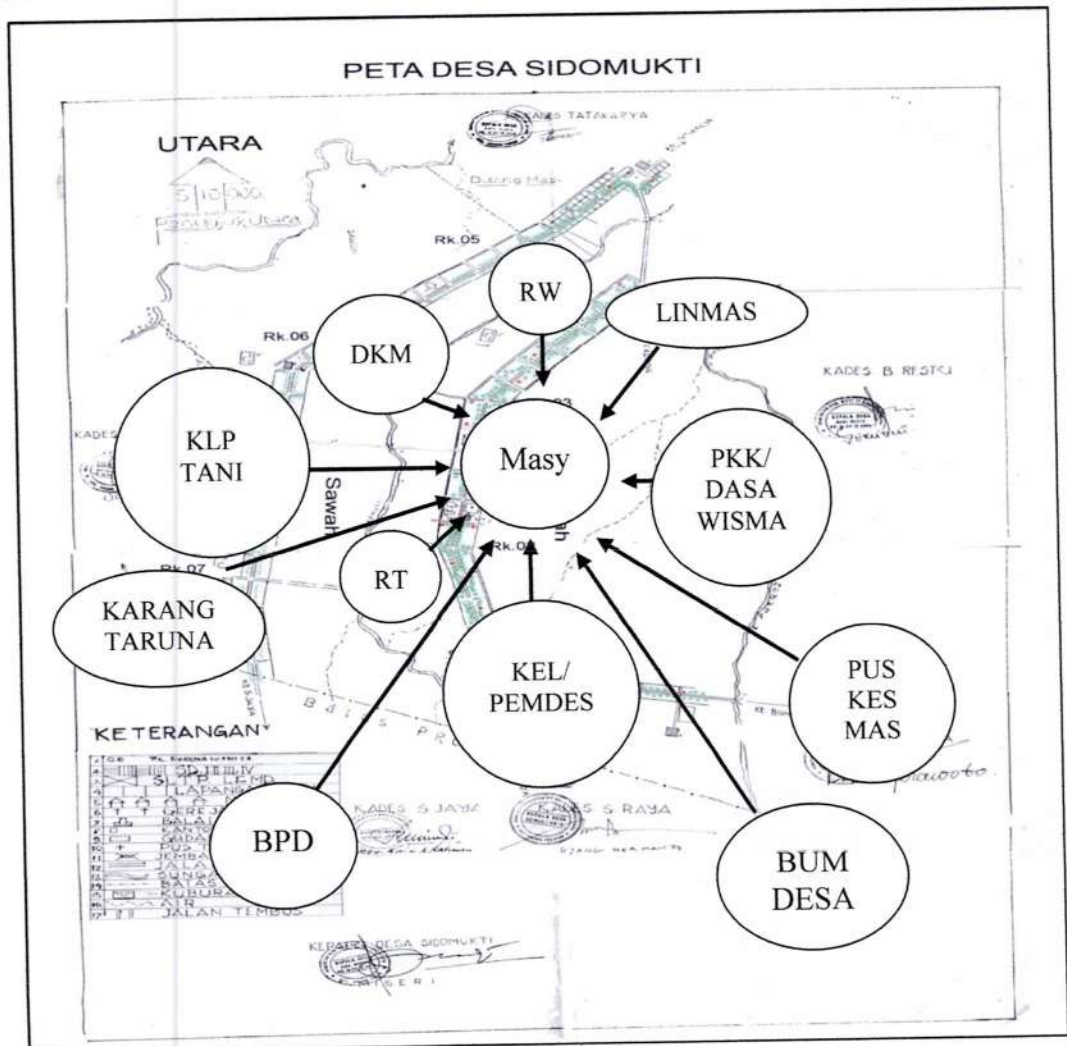
b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim hujan, areal sawah tergenang banjir	- Kelompok Tani - Kelompok Pompanisasi
2.	Pada musim hujan, banyak warga terserang DBD	- Bidan Desa - Kader Posyandu - TP-PKK
3.	Pada musim tanam, hama tikus dan tanaman merajalela di areal sawah	- Kelompok Tani - Pompanisasi - Tyto alba
4.	Pada musim tanam, harga pupuk masih tinggi	- Kelompok Tani - Gapoktan

NO	MASALAH	POTENSI
5.	Pada masa paceklik, harga pangan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Gapoktan - Lumbung Pangan
6.	Pada musim hujan dan musim panen, jalan sawah rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Tani - Organisasi Penebas
7.	Pada musim kemarau, banyak warga teresang ISPA	<ul style="list-style-type: none"> - Bidan Desa - Kader Posyandu - TP-PKK

3. HASIL PENGKAJIAN MASLAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarpras memadai
2	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	- Susunan pengurus profesional
3	LPMD	Kegiatan LPMD kurang aktif	- Susunan pengurus profesional
4	Karang Taruna	Peningkatan Kegiatan Karang Taruna di bidang olah raga dan usaha	- Susunan pengurus ada - Kegiatan usaha
5	LINMAS	Sebagian Linmas kurang aktif	- Linmas lengkap - Seragam ada
6	Kelompok Tani	Sebagian kegiatan kelompok tani tidak optimal	- Susunan pengurus profesional
7	Posyandu	Kegiatan Posyandu masih sebatas penimbangan	- SDM - Administrasi
8	RT / RW	Belum sepenuhnya tertib administrasi	- SDM
9	Puskesmas Pembantu	Parkir sepeda di sembarang tempat	- Bidan Desa
		Kesadaran PHBS masih rendah	- SDM - Lahan Kosong
10	SD / TK	Alat permainan anak masih kurang	- SDM - Lahan Kosong

2. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
a. GAMBAR KALENDER MUSIM

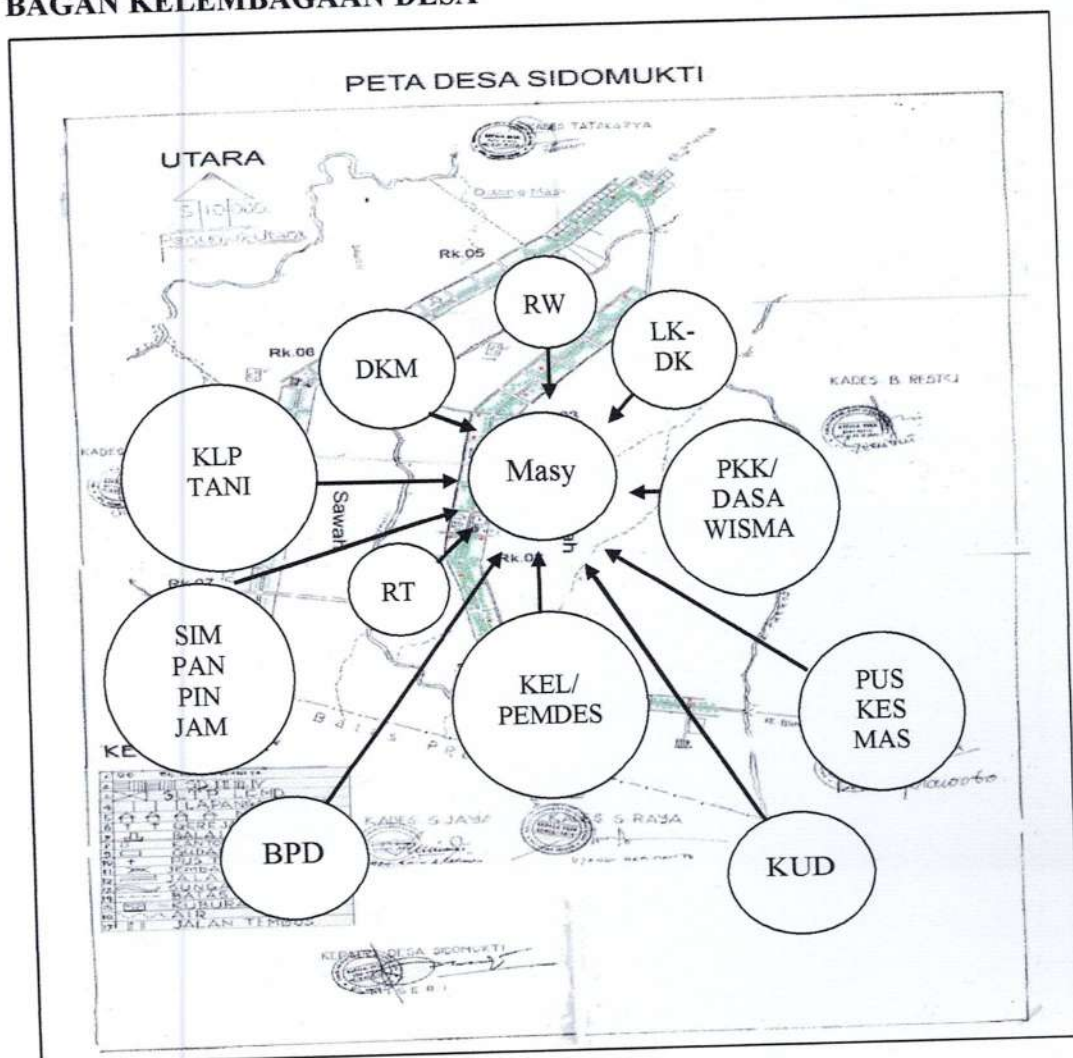
MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Gagal Panen	-	-	-	***	***	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	****	**	-	-	-	-	-
Banyak warga terkena penyakit ISPA	***	***	**	-	****	****	-	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	***	****	*	-	-	-	-	-
Banyak warga terkena Diare	*	*	-	-	-	-	-	-	***	**	-	***
Kesehatan (banyak penyakit)	*	****	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panen	****	****	-	-	-	-	-	-	****	****	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	****	****	-	-	****	****	-

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim hujan, areal sawah tergenang banjir	- Kelompok Tani - Kelompok Pompanisasi
2.	Pada musim hujan, banyak warga terserang DBD	- Bidan Desa - Kader Posyandu - TP-PKK
3.	Pada musim tanam, hama tikus dan tanaman merajalela di areal sawah	- Kelompok Tani - Pompanisasi - Tyto alba
4.	Pada musim tanam, harga pupuk masih tinggi	- Kelompok Tani - Gapoktan

NO	MASALAH	POTENSI
5.	Pada masa paceklik, harga pangan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Gapoktan - Lumbung Pangan
6.	Pada musim hujan dan musim panen, jalan sawah rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Tani - Organisasi Penebas
7.	Pada musim kemarau, banyak warga terserang ISPA	<ul style="list-style-type: none"> - Bidan Desa - Kader Posyandu - TP-PKK

3. HASIL PENGKAJIAN MASLAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA
a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarpras memadai
	PKK	Kegiatan PKK belum sepenuhnya aktif	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan pengurus profesional
	LPMD	Kegiatan LPMD kurang aktif	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan pengurus profesional
2.	Karang Taruna	Peningkatan Kegiatan Karang Taruna di bidang olah raga dan usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan pengurus ada - Kegiatan usaha
	LINMAS	Sebagian Linmas kurang aktif	<ul style="list-style-type: none"> - Linmas lengkap - Seragam ada
	Kelompok Tani	Sebagian kegiatan kelompok tani tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Susunan pengurus profesional
	Posyandu	Kegiatan Posyandu masih sebatas penimbangan	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Administrasi
	RT / RW	Belum sepenuhnya tertib administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM
	Puskesmas Pembantu	Parkir sepeda di sembarang tempat	<ul style="list-style-type: none"> - Bidan Desa
		Kesadaran PHBS masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Lahan Kosong
	SD / TK	Alat permainan anak masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Lahan Kosong

No	Bidang/Kegiatan	Vol	Lokasi	Tahun						Sumber Biaya			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	APBD/ APBN	APB Desa	Lainnya	
		850 m	RK VII				✓					✓	
	Pembangunan Drainase RT 05 RK VII	600 m	RK VII					✓				✓	
	Pembangunan Drainase RT 06 RK VII	650 m	RK VII						✓			✓	
	Pembangunan Drainase RT 07 RK VII	1 unit	RK VII			✓	✓	✓	✓			✓	
	Pembangunan Gedung Posyandu di RK VII	900 unit	Desa Sidomukti	✓		✓	✓	✓				✓	
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Utama belum optimal	1 unit	Desa Sidomukti					✓				✓	
	Perbaikan Gedung PAUD	1 unit	Desa Sidomukti				✓					✓	
	Pembangunan Perpustakaan Desa	1 unit	Desa Sidomukti		✓	✓	✓						
	Pengadaan Wabsite Desa	1 unit	Desa Sidomukti		✓								
II	BIDANG EKONOMI												
	Pertanian												
	Peningkatan pelayanan kelompok Pompanisasi	23 Klp	Desa Sidomukti	✓		✓							✓
	Optimalisasi penyuluhan petani ttg bahaya dan solusi penanganan hama tanaman	23 Poktan	Desa Sidomukti		✓	✓	✓						
	Penguatan Modal Usaha Gapoktan	1 unit	Gapoktan										
	Bantuan pengadaan mesin giling pakan ternak	23 unit	Desa Sidomukti	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Bantuan Modal, Pupuk & Benih	23 Poktan	Desa Sidomukti	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Peternakan/Perikanan												
	Bantuan modal usaha ternak sapi potong dan unggas	7 Kelompok	Desa Sidomukti	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	

No	Bidang/Kegiatan	Vol	Lokasi	Tahun						Sumber Biaya				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	APBD/ APBN	APB Desa	Lainnya		
	Penguatan PKK	1 unit	Desa Sidomukti	✓								✓		
	Pelatihan manajemen pengurus Kelompok Tani	23 Klip	Desa Sidomukti			✓							✓	
	Penguatan organisasi Linmas	1 unit	Desa Sidomukti				✓						✓	
	Penguatan peran dan fungsi LPM	1 unit	Desa Sidomukti	✓									✓	
	Penguatan peran dan fungsi Karang Taruna	1 unit	Desa Sidomukti										✓	
	Sosial													
	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	1 unit	Desa Sidomukti					✓					✓	
	Penyuluhan bahaya miras dan narkoba	1 unit	Desa Sidomukti					✓					✓	
	Pengadaan fasilitas olahraga	1 unit	Desa Sidomukti					✓					✓	
	Keagamaan													
	Peningkatan kesejahteraan guru keagamaan	7 unit	Desa Sidomukti	✓		✓						✓	✓	
	Peningkatan kesejahteraan imam masjid	7 unit	Desa Sidomukti	✓		✓						✓	✓	
	Peningkatan kegiatan pembinaan mental	7 unit	Desa Sidomukti						✓				✓	✓

Sidomukti,.....
Ketua LPM

Kepala Desa Sidomukti

EKO YUDIANTO

HENDRI MULYONO

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2022 - 2028**

DESA : SIDOMUKTI
KECAMATAN : ABUNG TIMUR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	g	h	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Sumber	o	p	q	r	s
									i	j	k	l	m	n						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
		a. Penetapan dan Pengawasan Batas Desa			Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DD	✓				
		b. Pendataan Desa												50.000.000						
		c. Penyusunan Tata Ruang Desa																		
		d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa												25.000.000						
		e. Pengelolaan Informasi Desa												55.000.000						
		f. Penelenggaraan Perencanaan Desa												42.000.000						
		g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan												42.000.000						
		h. Penyelenggaraan kerja sama antar desa			Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	250.000.000	DD	✓				
		i. Pembangunan Sarana dan prasarana kantor			Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	250.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	25.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	200.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓				
					Desa	48 org	Ketua RT	Desa	48 org	✓	✓	✓	✓	2.073.600.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Aparat Desa	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	1.634.400.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Aparat Desa	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	158.400.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Aparat Desa	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	120.000.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Masyarakat	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	BPD	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Masyarakat	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Pengurus LPM	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	120.000.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Masyarakat	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	45.000.000	DD	✓				
					Desa	72 bl	Pemuda	Desa	72 bl	✓	✓	✓	✓	25.000.000	DD	✓				
					Desa	12 kali	Masyarakat	Desa	12 kali	✓	✓	✓	✓	180.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	250.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	15.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	6.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	4.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	2.500.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	2.500.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	250.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Masyarakat	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	25.000.000	DD	✓				
					Desa	1 unit	Aparat Desa	Desa	1 unit	✓	✓	✓	✓	6.175.400.000		✓				

Jumlah Per Bidang 1

DESA : SIDOMUKTI
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan							Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	g	h	1	2	3	4	5	6	o	p	q	r	s	
																				f
a	c.	d.	e.	f.	g.	h.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	o.	p.	q.	r.	s.			
					Pembangunan pavingisasi Halaman Madin & TPQ RK 3	600 m ²	RK III	Masyarakat								60.000.000	DD			
					Pembangunan pavingisasi Masjid	RK V	450 m ²	Masyarakat								45.000.000	DD			
					Pembangunan pavingisasi Masjid	RK V	600 m ²	Masyarakat								60.000.000	DD			
					Pembangunan pavingisasi Masjid	RK VI	250 m ²	Masyarakat								25.000.000	DD			
					Pembangunan Pavingisasi Musolla	RK VI	200 m ²	Masyarakat								20.000.000	DD			
					Pembangunan pavingisasi Masjid	RK 7	450 m ²	Masyarakat								45.000.000	DD			
					Pembangunan Pavingisasi Gereja Katolik	RK VI	200 m ²	Masyarakat								20.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 01 RK 1	RK I	600 m x 200 cm	Masyarakat								150.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 02 RK 1	RK I	500 m x 200 cm	Masyarakat								125.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 03 RK 1	RK I	700 m	Masyarakat								175.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 04 RK 1	RK I	900 m	Masyarakat								225.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 05 RK 1	RK I	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 06 RK 1	RK I	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 07 RK 1	RK I	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 01 RK 2	RK 2	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 02 RK 2	RK 2	600 m	Masyarakat								150.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 03 RK 2	RK 2	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 04 RK 2	RK 2	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 05 RK 2	RK 2	500 m	Masyarakat								100.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 06 RK 2	RK 2	800 m	Masyarakat								200.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 07 RK 2	RK 2	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 08 RK 2	RK 2	550 m	Masyarakat								145.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 01 RK 3	RK 3	900 m	Masyarakat								225.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 02 RK 3	RK 3	450 m	Masyarakat								115.000.000	DD			
					Pembangunan Drainase RT 03 RK 3	RK 3	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD			
		Pembangunan Drainase RT 04 RK 3	RK 3	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 05 RK 3	RK 3	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 06 RK 3	RK 3	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 07 RK 3	RK 3	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 08 RK 3	RK 3	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 01 RK 4	RK 4	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 02 RK 4	RK 4	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 03 RK 4	RK 4	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 04 RK 4	RK 4	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 05 RK 4	RK 4	600 m	Masyarakat								150.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 06 RK 4	RK 4	700 m	Masyarakat								200.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 07 RK 4	RK 4	800 m	Masyarakat								150.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 08 RK 4	RK 4	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 01-A RK 5	RK 5	600 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 01-B RK 5	RK 5	700 m	Masyarakat								150.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 02 RK 5	RK 5	800 m	Masyarakat								200.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 03 RK 5	RK 5	600 m	Masyarakat								150.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 04 RK 5	RK 5	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 05 RK 5	RK 5	600 m	Masyarakat								150.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 06 RK 5	RK 5	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 07 RK 5	RK 5	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 08 RK 5	RK 5	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 01 RK 6	RK 6	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 02 RK 6	RK 6	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 03 RK 6	RK 6	600 m	Masyarakat								150.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 04 RK 6	RK 6	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 05 RK 6	RK 6	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 06 RK 6	RK 6	600 m	Masyarakat								150.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 07 RK 6	RK 6	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 08 RK 6	RK 6	500 m	Masyarakat								125.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 01 RK 7	RK 7	400 m	Masyarakat								100.000.000	DD						
		Pembangunan Drainase RT 02 RK 7	RK 7	900 m	Masyarakat								225.000.000	DD						

Pelaksanaan
 Pembangunan Desa

Pembangunan,
 Pemanfaatan dan
 Pemeliharaan sarana dan
 prasarana kesehatan

b

DESA : SIDOMUKTI
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Pembangunan Drainase RT 03 RK 7	RK 7	400 m	Masyarakat							100.000.000	DD			
				Pembangunan Drainase RT 04 RK 7	RK 7	700 m	Masyarakat							175.000.000	DD			
				Pembangunan Drainase RT 05 RK 7	RK 7	850 m	Masyarakat							150.000.000	DD			
				Pembangunan Drainase RT 06 RK 7	RK 7	600 m	Masyarakat							165.000.000	DD			
				Pembangunan Drainase RT 07 RK VII	RK 7	650 m	Masyarakat							225.000.000	DD			
				Pembangunan Drainase batas RK 4 – RK 5	RK 4	900 m	Masyarakat							700.000.000	DD			
				Pembangunan Sumur Bor dan MCK	Desa	14 unit	Masyarakat								DD			
				Pembangunan /perbaikan Gedung Posyandu	RK 2	1 unit	Balita dan Lansia							150.000.000	DD			
				Pembangunan Gedung Posyandu	RK 7	1 unit	Balita dan Lansia							150.000.000	DD			
				Pembangunan Rumah Pengelolaan Bank Sampah	Desa	7 unit	Masyarakat							147.000.000	DD			
				Penyelenggaraan posyandu/polindes	Desa	7 paket	Kader							35.000.000	DD			
				Penyuluhan kesehatan	Desa	1 unit	Masyarakat							30.000.000	DD			
				pengadaan fogging	Desa	1 unit	Kader							25.000.000	DD			
				optimalisasi kader posyandu	Desa	1 unit	Balita dan Lansia							150.000.000	DD			
				Pemberian PMT untuk balita dan lansia	Desa	1 unit	Masyarakat							250.000.000	DD			
				Pengadaan Mobil Ambulan Desa	Desa	1 unit	Masyarakat							35.000.000	DD			
				Penyuluhan Bahaya Miras dan Narkoba	Desa	2 unit	Anak Usia Dini							350.000.000	DD			
				perbaikan gedung PAUD/TK	RK 2, RK 6	4 unit	Masyarakat							350.000.000	DD			
				Pembangunan gedung TPA	RK 3, 5, 7	1 unit	Masyarakat							350.000.000	DD			
				Pembangunan gedung MADIN dan TPQ RK 3	RK 3	1 unit	Masyarakat							350.000.000	DD			
				Pembangunan gedung MADIN dan TPQ RK 5	RK 5	1 unit	Masyarakat							350.000.000	DD			
				Pendirian Balai Lathian kerja	Desa	1 unit	Masyarakat							200.000.000	DD			
				Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa	1 unit	Masyarakat							150.000.000	DD			
				Pengembangan Website Desa dan PPID	Desa	1 unit	Masyarakat							200.000.000	DD			
				Pengadaan sistem Desa DIGITAL	Desa	1 unit	Masyarakat							50.000.000	DD			
				Pengadaan mebelair Madin dan TPQ RK 3	RK 3	1 unit	Masyarakat							50.000.000	DD			
				Pengadaan mebelair Madin dan TPQ RK 5	RK 5	1 unit	Masyarakat							250.000.000	DD			
				Penguatan modal usaha Gapoktan	Desa	6 th	Kelompok Tani							900.000.000	DD			
				Pengadaan mesin penyiangtan tanaman jagung	Desa	30 unit	Kelompok Tani							2.000.000.000	DD			
				Bantuan modal, pupuk benih poltitan	Desa	30 unit	Masyarakat							4.500.000.000	DD			
				Pengadaan mesin panen padi	Desa	15 unit	Masyarakat							1.000.000.000	DD			
				Bantuan modal usaha ternak sapi potong	Desa	100 ekor	Masyarakat							100.000.000	DD			
				Bantuan modal usaha ternak sapi potong	Desa	1000 ekor	Masyarakat							500.000.000	DD			
				Bantuan modal usaha ternak bebek	Desa	15 klp	Masyarakat							50.000.000	DD			
				Penguatan modal kelompok usaha kecil	Desa	15 klp	Masyarakat							100.000.000	DD			
				Penanaman peyayitansi	Desa	3500.btg	Masyarakat							100.000.000	DD			

c
 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

d
 Pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

DESA : SIDOMUKTI
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan					Sasaran/ Mafaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan				Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang b	Sub Bidang d	Jenis Kegiatan e	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume g		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga			
							1 i	2 j	3 k	4 l	5 m	6 n						o	p	q
Jumlah Per Bidang 2																				
a	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Mafaat	1	2	3	4	5	6	29.372.000.000							
petalihan pembuatan pupuk kompos							kip tani	34 kip	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245.000.000				
b	Penyelenggaraan ketentrman dan keterbahn	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Mafaat	1	2	3	4	5	6	20.000.000							
petalihan pembuatan pakan fermentasi							kip tani	34 kip	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	245.000.000				
c	Pembinaan kerukunan umat beragama	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Mafaat	1	2	3	4	5	6	50.000.000							
petalihan pembuatan bio Gas Uambah ternak							kip tani	34 kip	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000				
Kegiatan Peningkatan kedisiplinan tertib kamtibmas							linmas	16 orang	Linmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	230.000.000				
d	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Mafaat	1	2	3	4	5	6	250.000.000	DD	✓	✓	✓			
pengadaan kegiatan peringatan hari besar umat beragama							Masyarakat	2 unit	Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	DD	✓	✓	
peningkatan Kegiatan Majelis Ta'lim							Desa	7 unit	Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
e	pengadaan dan Pembinaan lembaga adat Desa	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Mafaat	1	2	3	4	5	6	30.000.000							
peningkatan pembelajaran agama sejak kecil							Masyarakat	72 bl	Masyarakat masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000				
Pembangunan drainase lapangan sepak bola							Dusun	72 bl	Masyarakat masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
f	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Mafaat	1	2	3	4	5	6	250.000.000	DD	✓	✓	✓			
Peningkatan pagelaran seni tradisional							Dusun	1 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	DD	✓	✓	
kegiatan pencaksilat / karate							Dusun	40 org	Guru ngali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	DD	✓	✓	
g	Kegiatan lain sesuai kondisi Desa	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Mafaat	1	2	3	4	5	6	70.000.000	DD	✓	✓	✓			
Pengadaan peralatan kesenian Jaranan							Desa	40 org	Imam Masjid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	DD	✓	✓	
Peningkatan kesjahteraan guru agama							Desa	7 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	DD	✓	✓	
							1	2	3	4	5	6	6.000.000	DD	✓	✓				
							1	2	3	4	5	6	6.000.000	DD	✓	✓				
							1	2	3	4	5	6	36.000.000	DD	✓	✓				
							1	2	3	4	5	6	300.000.000	DD	✓	✓				
							1	2	3	4	5	6	250.000.000	DD	✓	✓				
Jumlah Per Bidang 3																				
penyertaan modal BumDesa																				

DESA : SIDOMUKTI
 KECAMATAN : ABUNG TIMUR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan									
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s					
				Pelatihan manajemen pengurus kelompok tani	Desa	1 unit	Masyarakat							50.000.000	DD								
		a		Pelatihan kewirausahaan pelatihan kegiatan	Desa	3 unit	Masyarakat							50.000.000	DD								
		b		Optimalisasi penyuluhan petani	Desa	1 unit	Masyarakat							25.000.000	DD								
				Pelatihan manajemen tupoksi perangkat Desa	Desa	1 unit	Perangkat Desa							50.000.000	DD								
				Peningkatan keaktifan aparat desa	Desa	1 unit	Perangkat Desa							25.000.000	DD								
				Pelatihan tata pemerintahan desa. BPD, LPMD	Desa	1 unit	Perangkat Desa							150.000.000	DD								
				Pelatihan tata kelola administrasi RT/RW	Desa	1 unit	Pengurus RT/RW							50.000.000	DD								
				Penguatan organisasi linmas	Desa	1 unit	Linmas							15.000.000	DD								
				Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Desa	1 unit	Pengurus LPM							15.000.000	DD								
		c		Penguatan peran dan fungsi Karang Taruna	Desa	1 unit	Pengurus Karang Taruna							10.000.000	DD								
				Pelatihan Kepala Desa	Desa	1 unit	Kepala Desa							5.000.000	DD								
				Pelatihan Sekretaris Desa	Desa	1 unit	Sekretaris Desa							15.000.000	DD								
				pelatihan perangkat Desa	Desa	1 unit	Aparat Desa							15.000.000	DD								
				Penguatan PKK	Desa	1 unit	Pengurus PKK							150.000.000	DD								
		d		Peningkatan kapasitas masyarakat	Desa	1 unit	Masyarakat							500.000.000	DD								
Jumlah Per Bidang 4														1.125.000.000									

SDOMUKTI.....
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui:
 Kepala Desa,

 EKO YUDIANTO



IMAM MARUF, S.AG



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMUKTI
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN ABUNG TIMUR TAHUN 2022**

KEPALA DESA SIDOMUKTI

- Menimbang : Bahwa dalam Pelaksanaan Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Sidomukti Wajib Mempunyai Perencanaan Pembangunan yang mengakomodir Kebutuhan Warga Masyarakat Desa yang pelaksanaannya dilakukan dengan transparansi dan melibatkan Partisipatif seluruh masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kewenangan Pengelolaan Pembangunan serta Keuangan Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
4. Peraturan Bupati No. 11 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
5. Bahwa Untuk Melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada point 1, 2, 3, dan 4, Perlu Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sidomukti

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, dengan keanggotaan yang terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas;
- a. Menyusun data - data Variabel Perencanaan Pembangunan sesuai dengan Kebutuhan Warga Masyarakat di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara
 - b. Melakukan Penggalan Gagasan di setiap Dusun dengan mempergunakan Metode yang ada Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur
 - c. Melakukan Musyawarah Dusun dalam Rangka Melaksanakan Proses Perencanaan yang Transparan dan Melibatkan warga Masyarakat
 - d. Melakukan Fasilitasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidomukti.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

ditetapkan di : Sidomukti
pada tanggal :

Kepala Desa Sidomukti


EKO YUDIANTO

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Sidomukti
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal :
Tentang : Tim Penyusun Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
Sidomukti Kecamatan Abung Timur
Tahun Anggaran 2022 s/d 2028.

**TIM PENYUSUN RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)**

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IMAM MA'RUF, S.Ag	KETUA TIM	SEKRETARIS DESA
2	HARIS SETIAWAN	SEKRETARIS	KAUR PEMERINTAHAN
3	YOSI ANDREAS	ANGGOTA	KAUR KEUANGAN
4	KASIMAN	ANGGOTA	KASI PELAYANAN
5	HANI ULFA TAYATUN N	ANGGOTA	KAUR UMUM
6	YAHMAN	ANGGOTA	KADUS 1
7	BARI WINARSO	ANGGOTA	KADUS 2
8	PAIMAN	ANGGOTA	KADUS 3
9	HARTONO	ANGGOTA	KADUS 4
10	EDI SANTOSO	ANGGOTA	KADUS 5
11	SUPARJO	ANGGOTA	KADUS 6
12	SUPARDI	ANGGOTA	KADUS 7
13	HENDRI MULYONO	ANGGOTA	KETUA LPM

Kepala Desa Sidomukti


EKO YUDIANTO

BERITA ACARA

MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOMUKTI

Berkaitan dengan telah dilaksanakan Musrembang Desa tahun 2022 di desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.
Dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-Desa dan RKP- Desa, maka pada hari ini:

Hari dan tanggal : Senin, 27 Desember 2021
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Sidomukti

Telah di selenggarakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di hadiri oleh Kepala Desa Beserta perangkat Desa Lainnya, Ketua LPM dan anggota, wakil- wakil dari Tokoh masyarakat, kepala Dusun, ketua RT, tokoh agama, kelompok Karang Taruna, serta unsur-unsur lain yang terkait di Desa sebagai mana tercantum di dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau Topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat adalah :

A. Materi atau Topik

Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM- Desa) yang diambil dari hasil musyawarah Dusun.

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: TABERANI STR	Dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulen	: SUMADI	Dari Sekretaris BPD
Nara Sumber	:	
	1. EKO YUDIANTO	Dari Kepala Desa
	2. IMAM MA'RUF, S.Ag	Dari Sekretaris Desa
	3. KASIMAN	Dari Kasi Pelayanan
	4. HARIS SETIAWAN	Dari Kasi Pemerintahan
	5. SAGUNG WIBOWO	Dari Kaur Perencanaan
	6. YAHMAN	Dari Kadus 1
	7. EDI SANTOSO	Dari Kadus 5

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui serta memutuskan / mengesahkan beberapa hal yang berketepatan menjadi Keputusan akhir dari Musyawarah BPD, yaitu :

1. Mengesahkan RPJM-Desa yang telah disusun dan dibuat oleh pemerintah Desa.
2. Menunjuk perwakilan masyarakat untuk mengikuti Musrenbang-Cam yaitu :

- | | |
|-------------------|------------------|
| a) Gatot Prihanto | d) Sagung Wibowo |
| b) Kasiman | e) Yosi andreas |
| c) Haris Setiawan | f) Edi Santoso |

Terbentuknya kepengurusan BPD Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomukti, 27 Desember 2021

Notulis/Sekretaris

Pemimpin Musyawarah

TABERANI STR


SUMADI

Mengetahui
Kepala Desa Sidomukti


EKO YUDIANTO

N A M A

A L A M A T

T A N D A T A N G A N

- | | | |
|---------|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |




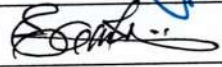
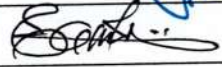
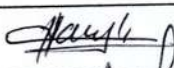
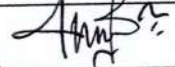


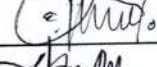

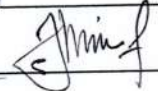
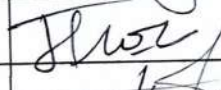
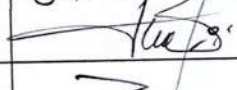
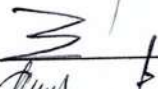


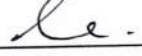
DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG)

DESA SIDOMUKTI KECAMATAN ABUNG TIMUR

Hari/tanggal : Kamis, 23 Desember 2021

Tempat : Balai Desa Sidomukti

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	EKO YUDIANTO	Kepala Desa	
2	IMAM MARUF, S.Ag	SEKRETARIS DESA	
3	KASIMAN	Kasi Pelayanan	
4	HARIS SETIAWAN	KASI PEMERINTAHAN	
5	Sagung Wibowo	Kaur Perencanaan	
6	yosi Andreas	Kaur Keuangan	
7	Hani Ulpa Tjastjant	Kaur Umum	
8	Tutik Sundari	Kasi Kesejahteraan	
9	Sukelrman	rt	
10	Hartini	kader	
11	Hardeji	rt 05 RW 01	
12	Fitriya ringsih	opener Barakora Barong	
13	HS Sapitri	Staff Desa	
14	Taberani Str	Ketua BPD	
15	Toguh Jusela	Tokoh Masyarakat	
16	E. Suryawan	Tokoh Masyarakat	
17	Yahman	Kadus 1	
18	Nur Rahmad	Ketua BumDes	
19	Ngatmin	Anggota BPD	
20	Bani Winarso	Kadus 2.	

21	Paeran Syah.	RT 5 RW 7	AM.
22	Bambang Eriyanto	RT 3 RK 1	Sluf
23	Jaypen	rt 2 rk 5	zaypa.
24	Gatot prihanto	Anggota Bpd.	Sluf
25	Khairul Anwar	Anggota BPD	Sluf
26	Iis Shalihah	Guru SMA LKMD	Sluf
27	Isna Indria, S.Pd.	KepSek CMA LKMD	Sluf
28	Harkini	Anggota. BPD.	Sluf
28	Darjio	RT 04 RK 05	Sluf
30	SUPARDI	RK 7	Sluf
31	Muryanti	RT 4 RK 1	Sluf
32	SUNARYO	RT 2 RK 2	Sluf
33	ABDUL GANI	RT 2 RK 1	Sluf
34	Jungidi	RK P RK 5	Sluf
35	Marwan	rt 1	Sluf
36	Supar	RK 3	Sluf
37	Paiman	kaelus 3	Sluf
37	Ris bowo	RT 1 RK 3	Sluf
39	Nyoman	RT 8 RK 6	Sluf
40	Suwarno	RT 5 RK 5	Sluf
41	TAMSIR	RT 01 RK 07	Sluf
42	Sihiyon	RK 6	Sluf
43	KUSTOYO	RK 7	Sluf
44	Waroji	RK 7.	Sluf
45	IKPRIYONO	RT 18/5	Sluf
46	Samani	RT 8 RK 5 sdm	Sluf
47	Hadi	RT 05 RW 3	Sluf
48	SOLIKUN	Linmas RK 3	Sluf

49	Sukarni	RT6	(S) Nuri
50	Sutirno	RT 06 RK 2	Jana
51	Suparman	RT05 RKG	Sul Jana
52	Kat Noto	RT01 RKG	Jana
53	GUNAWAN	Linmas RK1	(S) Nuri
54	Suyoto	RT 06 RW 01	Sul
55	M. Ridho Sai Wibowo	Guru SMA	Jana
56	M. Abd Aziz	RT 05 RKG	Jana
57	Har Yono	RK	Jana
58	Sugeng.	RT	Jana
59	Yasjo	RKY RT1	C. Nuri
60	Bupranto	RT RK1	Jana
61	Tariyo	RT 4 RKG	Jana
62	Primo	RT 00 RKG	Jana
63	Mahrum	RKG	Jana
64	Sutarto	RT7 RKG	Jana
65	Slamet	Tatoh Masyarakat	Jana
66	Sunarto	masyarakat	Jana
67	Bambang	Masyarakat	Jana
68	Primin	RT1 RKG	Jana
69	Ngatinin	RT6 RKG	Jana
70	Syaiful Arwan	RKG	Jana
71	SUDARSO	RKG	Jana
72	Handoko	RT	Jana
73	Ravzah	PLP	Jana
74			
75			
76			